



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026**



**DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
KENDARI, Juli 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha rahman dan rahim yang telah limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah yang Masa Jabatan Kelapa Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru disebutkan bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2023 maka dalam hal penyusunan dokumen perencanaan daerah tahunan RKPD yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diinstruksikan menyusun Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026, serta diperintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi tahun 2024 – 2026.

Berdasarkan hal tersebut disusun Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam periode 3 (tiga) tahun kedepan. Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 3 (tiga) tahunan yang akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam menyusun laporan kinerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra Revisi ini bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan Program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 dapat terwujud.

Kendari, Juli 2023

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura  
Provinsi Sulawesi Tenggara

**LA HARUNA, S.P., M.Si.**

NIP. 19721231 200212 1 026



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>13</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	42
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	46
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	52
3.3. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	53
3.4. Penentuan isu-isu strategis .....	55
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>58</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	58

<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ....</b>	<b>74</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>92</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP .....</b>	<b>93</b>





## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Perkembangan Dana APBD Tahun 2018 – 2022 .....	16
Tabel 2.2 Perkembangan Dana APBN Tahun 2018 – 2022 .....	17
Tabel 2.3 Kondisi Iklim Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2022 .....	19
Tabel 2.4 Kondisi Umum Komoditi Perkebunan Sulawesi Tenggara Tahun 2021.....	20
Tabel 2.5 Pelaku Usaha Komoditi Perkebunan Sulawesi Tenggara Tahun 2023.....	21
Tabel 2.6 Cakupan wilayah dan lokasi pengembangan kawasan hortikultura berbasis komoditas .....	24
Tabel 2.7 Perkembangan Alokasi Alsintan Tahun 2018 – 2022 .....	27
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara .....	29
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara .....	31
Tabel 2.10 Perkembangan Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2018 - 2022 di Sulawesi Tenggara .....	34
Tabel 2.11 Luas Areal dan Produksi Sayuran Hortikultura Tahun 2018 – 2022 di Sulawesi Tenggara .....	37
Tabel 2.12 Luas Tanaman dan Produksi Buah Tahun 2018 - 2022 di Sulawesi Tenggara	38
Tabel 2.13 Luas Tanaman dan Produksi Hias Tahun 2018 - 2022 di Sulawesi Tenggara	39
Tabel 2.14 Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Biofarmaka Tahun 2018 - 2022 di Tenggara .....	40
Tabel 2.15 Kontribusi Perkebunan dan Hortikultura terhadap PDRB PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2022 .....	41
Tabel 3.1 Matriks SWOT Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara .....	47
Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	50
Tabel 3.3 Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional, RENSTRA Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura, Ditjen PSP dan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara .....	52
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Perkebunan dan Hortikultura Hortikultura 2024 – 2026 .....	58
Tabel 4.2 Casecading Kinerja Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Hortikultura 2024 – 2026 .....	61
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara .....	70

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026**

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Hortikultura 2024 – 2026 .....	79
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM .....	92



**DAFTAR GAMBAR***Halaman*

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara .....	15
Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Pegawai Dinas Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.....	15
Gambar 2.3 Lokasi Pengembangan Kawasan Perkebunan dan Hortikultura di Provinsi Sulawesi Tenggara .....	21
Gambar 2.4 Perbenihan Perkebunan di Provinsi Sulawesi Tenggara .....	22
Gambar 2.5 Kelembagaan Petani Perkebunan di Provinsi Sulawesi Tenggara .....	23



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, memuat tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan OPD penjabaran hasil telaahan visi, misi dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dengan berakhirnya masa pemerintahan kepala daerah terpilih H. Ali Mazi SH. dan H. Lukman Abunawas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2018-2023 maka terjadi kekosongan jabatan dan berakhirnya RPJMD sebagai dasar Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun untuk penyusunan anggaran tahunan.

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat lima (5), maka diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak Nasional pada tahun 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Masa Jabatan Kelapa Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru disebutkan bagi

daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2023 maka dalam hal penyusunan dokumen perencanaan daerah tahunan RKPD yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diinstruksikan menyusun Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026, serta diperintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi tahun 2024 – 2026

Penyusunan RENSTRA Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan melalui proses koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersamaan dengan penyusunan RPD. Rangkaian proses penyusunan Renstra mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keenam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.

Perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara memiliki potensi dan kontribusi yang cukup besar terhadap produksi nasional. Luas areal Perkebunan Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 sebesar 497.782 Ha dengan produksi mencapai 217.236 ton. Kondisi tersebut didukung oleh berkembangnya komoditi unggulan perkebunan Sulawesi Tenggara. Produksi Kakao di Sulawesi Tenggara mencapai 106.667 ton yang berkontribusi ± 15,16% terhadap produksi nasional, sementara produksi jambu mete Sulawesi Tenggara mencapai 51.834 ton dan berkontribusi terhadap nasional sebesar 30,42%. Selain kakao dan jambu mete, Perkebunan Sulawesi Tenggara memiliki 5 komoditi unggulan yang termasuk kedalam tanaman perkebunan, yaitu kelapa, cengkeh, lada, kopi dan pala. Produksi kelapa Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 mencapai 39.192 ton dan berkontribusi terhadap nasional sebesar 1,39 %, cengkeh memiliki produksi 9.853 ton yang berkontribusi 7,26% terhadap produksi nasional, produksi lada 5.749



ton yang berkontribusi 7,43% terhadap produksi nasional, produksi kopi 2.779 ton yang berkontribusi 0,36% terhadap produksi nasional, produksi pala 769 ton yang berkontribusi 1,95% terhadap produksi nasional.

Luas areal hortikultura komoditi sayuran buah semusim 29.352,75 Ha dengan produksi 366.033,49 Kuintal. Komoditi unggulan hortikultura di Sulawesi Tenggara adalah bawang merah, cabai, jeruk dan durian. Produksi bawang merah Sulawesi Tenggara tahun 2022 mencapai 4.489,18 Kuintal dan berkontribusi terhadap nasional sebesar 0,02 %, produksi cabai 89.952,25 Kuintal yang berkontribusi 0,23% terhadap produksi nasional, produksi jeruk 199.270,76 Kuintal yang berkontribusi 0,92% terhadap produksi nasional, produksi durian 237.445,68 Kuintal yang berkontribusi 2,06% terhadap produksi nasional

Pada kurun waktu 2018 – 2022, sub kategori perkebunan dan hortikultura masih menjadi sub kategori penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara. Peran strategis perkebunan dan hortikultura baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budidaya tercermin melalui kontribusinya dalam PDRB Sulawesi Tenggara, peluang investasi dan sumber devisa Provinsi dari komoditas ekspor baik nasional maupun luar negeri, penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, sumber utama dan pendukung ekonomi petani dalam pengurangan kemiskinan, upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup melalui konservasi lahan sebagaimana dalam penjelasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang menyatakan bahwa hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran,

bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

Mengingat peran strategis dan potensi perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara, maka penyusunan RENSTRA Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 - 2026 merupakan upaya mensinergikan prioritas Nasional dan Provinsi sehingga ada keterkaitan arah kebijakan dan pembangunan pertanian khususnya sub kategori perkebunan dan hortikultura dapat berjalan optimal. Prioritas nasional dimaksud adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan yang diterjemahkan kedalam prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pemerataan pembangunan fokus pada mendorong transformasi ekonomi pada sektor pariwisata, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan hilirisasi pertambangan serta program padat karya untuk menyerap tenaga kerja. Kebijakan dalam RENSTRA Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada tujuan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Hortikultura yaitu tujuan tiga (3) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dengan sasaran Mewujudkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan.

Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara difokuskan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dan nilai tambahan tanaman perkebunan dan hortikultura unggulan daerah. Selanjutnya kebijakan tersebut dijabarkan kedalam Renja yang mengacu pada RKPD dalam satu tahun kedepan. Rencana pembangunan tahunan (Renja) inilah yang kemudian dilengkapi dengan rencana anggaran (penganggaran), sehingga seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah khususnya sub sektor perkebunan dan hortikultura dapat dioperasionalkan. Rencana



Kerja OPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategi OPD Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus;
5. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  9. Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah yang Masa Jabatan Kelapa Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
  11. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
  12. Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005 – 2025;
  13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 42 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara;

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024-2026;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara disusun sebagai penjabaran dari RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024- 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan pilihan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan di bidang perkebunan dan hortikultura yang akan dilaksanakan secara bertahap tiap tahun untuk tiga tahun ke depan. Selain itu juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

#### **b. Tujuan**

Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara adalah dokumen perencanaan pembangunan sub sektor Perkebunan dan Hortikultura dalam periode 2024 - 2026, ditetapkan dengan tujuan:

- 1) Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2024 - 2026;
- 2) Teridentifikasinya program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2024 - 2026;

- 3) Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara (rencana kerja tahunan) dalam periode tiga tahun ke depan;
- 4) Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara baik satu tahunan maupun tiga tahunan

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026, disusun melalui sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### **1.1 Latar Belakang,**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

###### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

###### **1.3 Maksud dan Tujuan**



Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT**

### **DAERAH**

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

##### Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

#### 3.2 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau

dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

#### Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; 4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran



jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

#### 4.2. Casecading Kinerja

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel TC.26

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

### **BAB VIII PENUTUP**

### **LAMPIRAN**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara

Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bidang perkebunan dan hortikultura, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 42 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:

##### 2.1.1. Tugas

Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara pada pasal 3 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 42 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian sub bidang pekebunan dan hortikultura

##### 2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Perkebunan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagaimana disebutkan pada pasal 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 42 Tahun 2022, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan perkebunan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan perkebunan dan hortikultura;
- b. Penyusunan program penyuluhan perkebunan dan hortikultura;

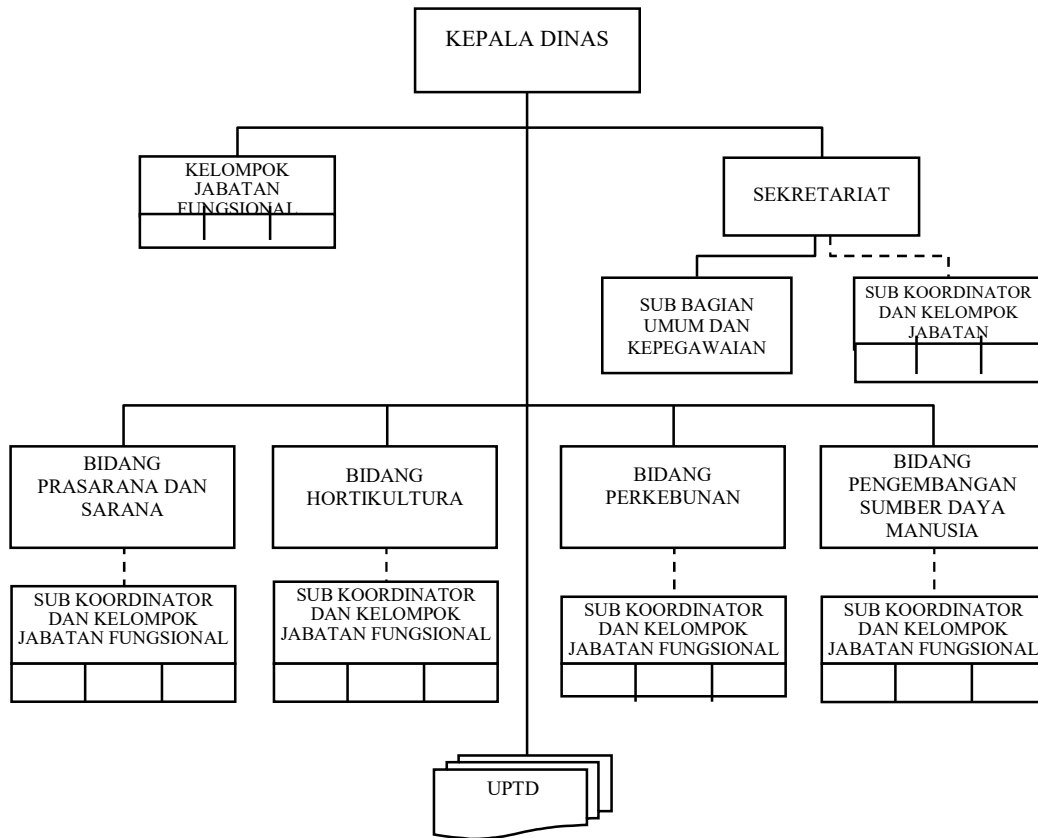


- c. Penataan prasarana perkebunan dan hortikultura
- d. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan dan hortikultura
- e. Pengawasan sarana perkebunan dan hortikultura
- f. Pembinaan produksi dibidang perkebunan dan hortikultura
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman perkebunan dan hortikultura
- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam,
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan perkebunan dan hortikultura;
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis perkebunan dan hortikultura;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan hortikultura;
- m. Pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

### 2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2022, tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dimaksud terinci dalam gambar 2.1 berikut

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA



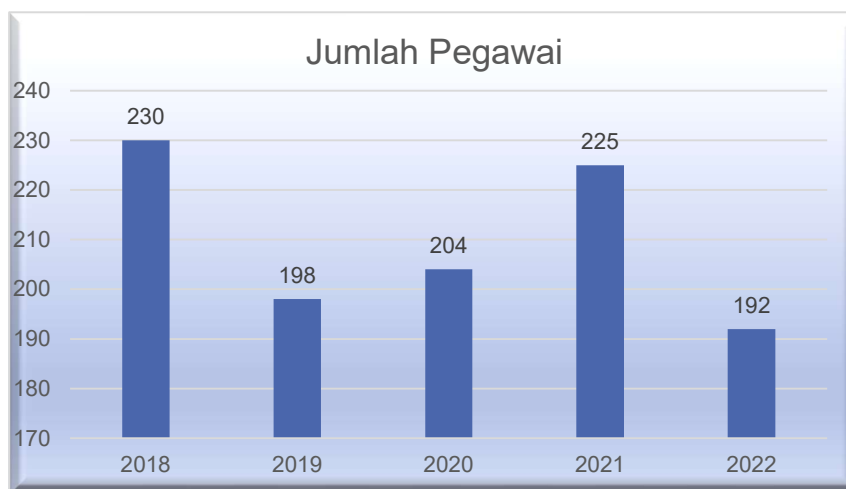
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara

## 2.2. Sumber Daya

Secara umum, keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi Sulawesi Tenggara tidak terlepas dari dukungan sumberdaya meliputi sumber daya aparatur yang terlibat dibidang perkebunan dan hortikultura, sumber daya alam termasuk air, lahan, komoditas beserta sarana prasarana

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 terkait tugas dan fungsinya didukung oleh 230 orang dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 sebanyak 192 orang. Komposisi pegawai Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari Golongan IV sebanyak 17 orang, golongan III 141 orang, dan golongan II sebanyak 32 orang. Berdasarkan jenis jabatan dapat diklasifikasikan 12 orang merupakan pejabat fungsional khusus, selebihnya pejabat struktural dan fungsional umum. Dilihat dari komposisi pegawai dengan presentase pegawai golongan III mencapai  $\geq 50\%$  menunjukkan kualitas SDM Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara sangat baik untuk menjalankan tugas dan fungsinya.



Gambar 2.2. Perkembangan Jumlah Pegawai Dinas Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara



Jumlah pegawai Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan gambar 2.2 cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya pegawai yang sudah memasuki usia purna tugas tidak diimbangi dengan jumlah pegawai baru yang masuk dan juga adanya pegawai yang masuk/pindah tugas dari Kabupaten/Kota. Namun, jumlah pegawai saat ini sudah cukup ideal untuk Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya. Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 terkait tugas dan fungsinya didukung oleh 178 orang pegawai PNS dengan tenaga honorer sebanyak 14 orang.

### 2.2.2. Sumber Daya Anggaran

Sumber anggaran pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara ditopang oleh dana APBD dan APBN. Pada tahun 2022 dana APBD Dinas Perkebunan dan Hortikultura sebesar Rp. 48.967.851.129,- sementara Dana APBN mencapai Rp. 26.359.684.000,-. Secara lengkap anggaran Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel dibawah 2.1.

Tabel 2.1. Perkembangan Dana APBD 2018 - 2022

Kegiatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
APBD	25.774.496.82	41.210.757.40	24.057.199.15	38.858.383.05	48.967.851.12
Reguler	5	0	0	6	9

Berdasarkan tabel tersebut, dana APBD Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19 dan stabil pada tahun 2020 – 2022. Sejalan dengan dana APBD, dana APBN juga mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Secara lengkap perkembangan dana APBN dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perkembangan Dana APBN 2018 – 2022

No	Kegiatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>Ditjen Bun</b>	113.674.105.000	28.493.189.000	21.408.807.000	8.689.796.000	15.763.542.000
	Dekon	1.542.020.000	1.589.213.000	1.494.820.000	875.135.000	1.071.515.000
	TP. Provinsi	112.132.085.000	26.903.976.000	19.913.987.000	7.814.660.000	14.692.027.000
2	<b>Ditjen Horti</b>	<b>18.335.590.000</b>	<b>13276993000</b>	<b>9.192.644.000</b>	<b>6.165.649.000</b>	<b>8.702.542.000</b>
	Dekon	3.335.100.000	3.682.368.000	2.878.040.000	3.462.371.000	4.681.230.000
	TP. Provinsi	15.000.490.000	9.594.625.000	6.314.604.000	2.703.278.000	4.021.312.000
3	<b>Ditjen PSP</b>	-	<b>1.359.000.000</b>	<b>4.679.000.000</b>	<b>2.654.000.000</b>	<b>1.893.600.000</b>
	TP. Provinsi	-	1.359.000.000	4.679.000.000	2.654.000.000	1.893.600.000
<b>Jum. Dekon</b>		<b>4.877.120.000</b>	<b>5.271.581.000</b>	<b>4.372.860.000</b>	<b>4.337.506.000</b>	<b>5.752.745.000</b>
<b>Jum. TP. Prov.</b>		<b>127.132.575.000</b>	<b>37.857.601.000</b>	<b>30.907.591.000</b>	<b>13.171.938.000</b>	<b>20.606.939.000</b>
<b>Jum. Dekon + TP</b>		<b>132.009.695.000</b>	<b>43.129.182.000</b>	<b>35.280.451.000</b>	<b>17.509.444.000</b>	<b>26.359.684.000</b>





### 2.2.3 Potensi Perkebunan dan Hortikultura

Potensi sumber daya alam (SDA) sangatlah penting diperhatikan dan dijaga keberlanjutannya mengingat SDA dan lingkungan hidup berperan penting terhadap penyediaan pangan dan penyedia bahan baku bagi industri.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

Jenis-jenis SDA pertanian meliputi : a) Sumber daya biotik (komoditas yang menunjang siklus produksi pertanian); b) Sumber daya abiotik (air, tanah, udara, cahaya, matahari). Namun, secara umum, SDA pertanian terbagi dalam SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Komoditas perkebunan dan hortikultura sangat beragam dan diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan waktu tanam dan panen, yaitu tanaman tahunan dan tanaman semusim yang kesemuanya potensial untuk dikembangkan, mengingat wilayah Sulawesi Tenggara mempunyai keragaman zona agroekologi dan topografi

Tabel 2.3. Kondisi Iklim Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2022

Kondisi Iklim	2020	2021	2022
Suhu Rata-rata (oC)	27,30	26,70	28,50
Kelembaban Rata-Rata (%)	86,00	86,00	79,50
Jumlah Curah Hujan (mm)	2.316,90	2.767,30	2.695,40
Penyinaran	61,25%	50,00%	4,20 Jam

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023

Terkait dengan SDA lahan pertanian, saat ini keberlanjutan sektor pertanian– tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius, yakni alih fungsi lahan dan serangan hama penyakit. Berdasarkan potensi wilayah pengembangan, komoditas Sulawesi Tenggara memiliki karakteristik masing-masing berdasarkan kesesuaian lahan. Berikut pengembangan komoditas perkebunan dan hortikultura unggulan di Sulawesi Tenggara

#### a. Komoditi Perkebunan

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang masuk ke dalam koridor 4, yaitu Koridor Ekonomi Sulawesi - Maluku Utara dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Nasional Program ini dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Menteri Pertanian Nomor: 50/Permentan/ Ot.140/8/2012 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian; Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 46/Kpts/PD.300/1/2015 Tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional; Dengan adanya pengembangan kawasan yang berbasis komoditi akan dapat menjamin terpenuhinya ketersediaan pasokan produksi seiring dengan adanya tantangan perkebunan yang semakin berat.



Tabel 2.4. Kondisi Umum Komoditi Perkebunan Sulawesi Tenggara Tahun 2021

No	Komoditi	Keadaan Tanaman Pada Tahun Laporan (Ha)				Produksi (Ton)	Produktiv. (Kg/Ha)	Jml Petani Perkeb. (KK)
		TBM	TM	TR/TTM	Jumlah			
1	Kakao	32.477	168.692	35.653	236.822	107.053	634,6	152.891
2	Jambu Mete	10.691	84.808	20.005	115.504	51.700	609,6	92.525
3	Kelapa Dalam	10.575	45.078	3.110	58.763	39.155	868,6	84.300
4	Kelapa Hybrida	222	2.697	179	3.098	3.589	1.330,4	9.302
5	Cengkeh	9.603	24.020	361	33.984	9.490	395,1	26.230
6	L a d a	3.877	10.872	1.403	16.153	5.579	513,1	24.022
7	Kopi robusta	1.601	5.900	1.376	8.877	2.776	470,5	16.645
8	Kopi arabica	200	0	0	200	0	0	285
9	Vanili	94	312	40	447	31	100,1	822
10	P a l a	3.348	1.571	104	5.023	763	485,3	5.774
11	Kemiri	395	1.751	547	2.693	927	529,7	7.795
12	Enau	448	2.698	297	3.442	1.982	734,8	5.069
13	Asam Jawa	16	115	15	145	27	235,7	1.511
14	Pinang	161	421	39	621	174	413,6	3.590
15	Kapuk	40	647	140	827	146	225,7	5.496
16	Sagu	1.606	2.514	222	4.342	2.705	1.076,1	8.776
17	Jarak Pagar	1	1	2	4	0,00	0,0	12
18	Kelapa Sawit	5.338	2.599	11	7.948	3.950	1.520,1	5.565
19	Karet	454	264	0	718	159	603	467

Sumber : Statistik Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021

Lokasi pengembangan Kawasan perkebunan nasional berdasarkan Kepmentan No. 472/Kpts/RC.040/2018, Berdasarkan Instruksi Langsung Presiden Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Kakao : Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Muna, Muna Barat, Bombana, Buton, Buton Utara.
2. Jambu Mete : Bombana, Muna, Buton, Buton Tengah.
3. Lada : Konawe, Konawe Selatan, Kolaka dan Kolaka Utara.
4. Kelapa : Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur.
5. Kopi: Kolaka Timur, Konawe, Bombana, dan Konawe.
6. Cengkeh : Bombana
7. Kelapa Sawit : Konawe Utara dan Kolaka
8. Tebu : Konawe Selatan, Bombana, Muna dan Muna Barat
9. Sagu : Konawe (kebun induk)



Gambar 2.3. Lokasi Pengembangan Kawasan Perkebunan dan Hortikultura di Provinsi Sulawesi Tenggara

Tabel 2.5. Pelaku Usaha Komoditi Perkebunan Sulawesi Tenggara Tahun 2023

NO	NAMA PERUSAHAAN	KOMODITI	PRODUK	ALAMAT/Hp	TUJUAN PEMASARAN
1	KallaKakao Industri, PT.	Kakao	kakao Butter	Jl. Wolter Mongisidi No. 8b. (Poros Bandara) Konsel Suktra	Belanda
2	Mars Symbioscience Indonesia (EFFEM)	Kakao	Olahan Kakao	Jl. Klma Xkau A/6, Makassar, 0411- 515702, dan di Jl Poros Kolaka Utara - Sultra	Belanda dan Amerika, Italia
3	UD. Pitra Alena	Kelapa, Mete, Kemiri, Lada, Pda, Kapas, dan Pinang	Olahan Kelapa, Mete gelondongan, ladaputih	Mandongga Kendari Sultra	Antarapulau
4	Utama Agrindo Mas, PT	Kelapa Sawit	CPO	Jl. Poros Kendari, Unaaha desa Wawolahanbuti Konawe Sultra (081-3672 26184	AntarPulau
5	Tropica Coco Prima, PT	Kelapa	Tepung Kelapa	Jl. Raya Trans Sulawesi, Minaha Selatan, SULUT 0131-871700	Malasya
6					

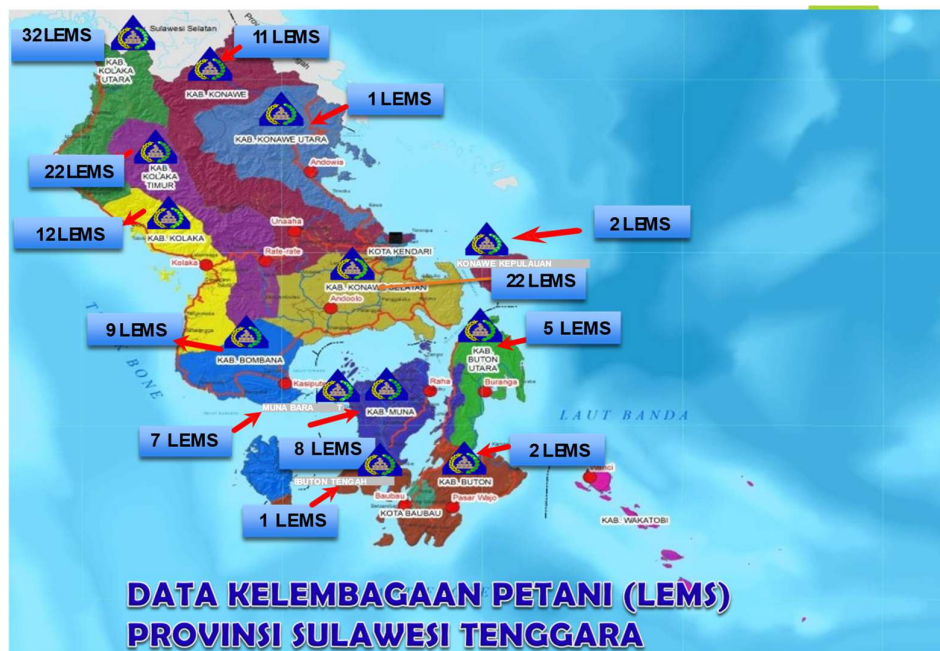




**Kelembagaan Petani Perkebunan**

Sejak tahun 2008 Pemda Sulawesi Tenggara memperkuat kelembagaan petani di Perdesaan melalui Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera sebagai upaya menyempurnakan kelembagaan petani yang telah ada. LEM Sejahtera adalah lembaga ekonomi desa yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat desa dengan pendekatan kearifan lokal, dimana seluruh warga desa menghimpun kekuatan swadaya untuk mendayagunakan potensi sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya.

Sampai dengan tahun 2023, LEM Sejahtera telah terbentuk sebanyak 134 kelompok yang tersebar di 13 kabupaten. Masing-masing kabupaten dibentuk koperasi LEM Sejahtera sebagai lembaga bisnis bagi seluruh anggota LEM Sejahtera di kabupaten yang bersangkutan



Gambar 2.5 . Kelembagaan Petani Perkebunan di Provinsi Sulawesi Tenggara



Kegiatan Lem Sejahtera Desa

1. Penguatan modal usaha (Simpanan Anggota);
2. Penyediaan sarana produksi (Benih, Pupuk dan Pestisida);
3. Pelopor peningkatan produksi dan produktivitas (gerak kebun sehat dan demplot);
4. Penggerak peningkatan mutu dan pemasaran ;
5. Mediator layanan perbankan dan lembaga penunjang lainnya.

**b. Komoditi Hortikultura**

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 45/kpts/PD.200/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Cabai, Bawang Merah dan Jeruk Nasional, di Provinsi Sulawesi Tenggara Kawasan cabai ditetapkan pada 6 Kabupaten (Kolaka Utara, Buton, Kolaka, Konawe Selatan, Konawe dan Kolaka Timur), Bawang Merah di 2 Kabupaten (Kolaka Utara dan Kolaka Timur) dan Jeruk di 3 Kabupaten (Kabupaten Buton Selatan, Konawe Selatan dan Buton Utara). Ketiga komoditas tersebut ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional.

Tabel 2.6. Cakupan wilayah dan lokasi pengembangan kawasan hortikultura berbasis komoditas

No	Komoditi	Cakupan Lokasi Wilayah Kabupaten	Cakupan Lokasi Pengembangan Wilayah Kecamatan
1.	Bawang Merah	Kolaka Utara	Wawo, Lasusua, Kadeoha, Tiwu, Ngapa, Watunohu, Pakue, Batu Putih, Porehu Totallang, Lambai, Rante Angin, Pakue Utara, dan Pakue Tengah
		Kolaka Timur	Ueesi, Uluwoi
2.	Cabai	Kolaka	Toari, Watubangga, Palunggona, Pomala, Latambaga, Samaturu, Wolo, Kolaka, Baula, Wundulako, Iwoindaa, Tanggetada, Watubangga, Samaturu, Pomalaa, Latambaga, Baula
		Kolaka Utara	Wawo, Lambai, Tiwu, Ngapa, Watunohu, Pakue, Porehu, Pakue Tengah, Rante Angin, Kodeoha, Pakue Tengah, Batu Putih.
		Buton	Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Siontapina, Wolowa, Pasarwajo
		Konawe	Wonggeduku, Wonggeduku Barat, Asinua, Amonggedo, Uepai, Abuki, Konawe, Besulutu
		Konawe Selatan	Wolasi, Konda, Moramo, Angata, Ranomeeto Barat, Landonu, Andoolo
3.	Jeruk	Buton Selatan	Batauga, Sampolawa, Lapandewa, Siompu, Siompu Barat, Kadatua, Batu Atas





		Konawe Selatan	Wolasi, Konda, Moramo Utara, Moramo, Ranomeeto Barat dan Buka
		Buton Utara	Wakorumba Utara, Kulisusu, Kulisusu Barat, Bonegunu, Kambowa

Sumber : Masterplan pengembangan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Provinsi Sulawesi Tenggara 2017-2020

## 2.2.4 Sarana Prasarana Perkebunan dan Hortikultura

Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penggerak pembangunan perkebunan dan Hortikultura terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan dan hortikultura, maka ketersediaan sarana prasarana menjadi syarat utama. Dinas perkebunan dan hortikultura memiliki Kantor utama yang didukung oleh keberadaan 4 UPTD yaitu UPTD BTPH (Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura), UPTD BPSBPH (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura), UPTD BPBTP (Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan) dan UPTD BBIH (Balai Benih Induk Tanaman Hortikultura). Kebijakan pembangunan perkebunan dan hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara komprehensif yang dimulai dari hulu hingga hilir, dari penyediaan benih yang bersertifikat, perlindungan tanaman hingga pemasaran hasil produksi.

### a) Ketersediaan Sarana Produksi (Bibit/Benih, Pupuk, dan Obat-obatan tanaman).

Sarana produksi merupakan komponen utama dalam pembudidayaan tanaman perkebunan dan hortikultura, dalam hal ini adalah tentang biaya produksi yang dikeluarkan petani. Dinas perkebunan dan hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kebijakan yang bersifat bottom up dalam bentuk hibah barang kepada kelompok tani dengan persyaratan pengajuan proposal. Oleh sebab itu, alokasi bantuan sebagian besar berupa sarana produksi yang meliputi bantuan bibit, pupuk dan juga obat-obatan tanaman perkebunan dan hortikultura. Proses tersebut tentunya mengacu kepada program prioritas Provinsi dan juga



berdasarkan likasi prioritas pengembangan komoditi perkebunan dan hortikultura. Sasaran peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura tidak terlepas dari tepat atau tidaknya bantuan yang diberikan. Bantuan bibit/benih selain meringankan biaya produksi petani dalam berbudidaya, secara tidak langsung mampu menambah jumlah produksi kelompok oleh karena pertambahan luas areal. Bantuan pupuk mampu meningkatkan produktivitas tanaman, begitu juga dengan obat-obatan yang mampu mengurangi presentase kehilangan produksi oleh karena serangan hama penyakit tanaman.

#### **b) Dukungan Alsintan**

Dukungan alsintan dalam proses produksi tanaman perkebunan dan hortikultura yang dimulai dari kegiatan pengolahan tanah, perbenihan, pembibitan, pengairan, penyiangan, sampai pemanenan saat ini diperlukan dikarenakan makin terbatasnya tenaga kerja pertanian di pedesaan dan untuk meningkatkan kemampuan penanganan pra dan pasca panen baik secara kuantitas maupun kualitas. Beberapa waktu terakhir oleh adanya kebijakan Gubernur terkait pengembangan perkebunan dan hortikultura hulu-hilir.

Dukungan tersebut bertujuan untuk mengurangi biaya produksi petani, efisiensi waktu dan biaya dan mampu meningkatkan nilai tambah petani perkebunan. Namun jumlah permintaan alsintan oleh kelompok tani tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang ada pada Dinas, sehingga proses verifikasi penerima bantuan dilakukan berdasarkan potensi dan luasan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok tani

Perkembangan alsintan bagi petani yang bersumber dari dana APBD dan APBN pada Tabel 2.7.



Tabel 2.7. Perkembangan Alokasi Alsintan Tahun 2018 – 2022

Jenis Alat	2018	2019	2020	2021	2022
Handtractor	1 Unit			4 Unit	
Hand Sprayer		2 Unit			119 unit
Exavator					5 Unit
Chainsaw Besar					8 Unit
Chainsaw Kecil					15 Unit
Tangki Charger					16 Unit
Mesin Pemotong Rumput					25 Unit
Jalan Usaha Tani					16.164 Meter
Traktor Roda Empat				1 Unit	
Pemotong Rumput		2 Unit		20 Unit	
Hand Sprayer				150 Unit	

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.3.1 Capaian terhadap Sasaran Renstra Perkebunan dan Hortikultura

Kinerja umum pembangunan perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara langsung ataupun tidak langsung merupakan gambaran dari pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kinerja umum pembangunan perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara langsung ataupun tidak langsung merupakan gambaran dari pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada

Pada kurun waktu 2018 - 2022, luas total areal perkebunan di Sulawesi Tenggara berkurang 12 ribu ha, dengan nilai produksi yang meningkat dari tahun 2018 – 2020 dengan rata-rata peningkatan produksi sebesar 0,01%. Namun di tahun 2021 - 2022 terjadi penurunan produksi rata-rata sebesar 0,05%. Produktivitas perkebunan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,9 % dan mulai meningkat 0,01% ditahun 2022. Pada kurun waktu 2018 – 2022 terjadi penurunan luas areal perkebunan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,006% pertahun. Penurunan luas areal tanaman perkebunan tidak terlepas dari alih fungsi lahan menjadi peruntukan non pertanian dan sebagai dampak adanya pandemi covid-19. Tenaga kerja sektor perkebunan



kurun waktu 2018 – 2022 juga mengalami penurunan dengan rata-rata 0,17% pertahun sebagai dampak dari adanya lapangan kerja baru sebagai pekerja tambang yang dianggap sangat menjanjikan oleh petani.



**Tabel 2.8. (T-C.23)**  
**Pencapaian Kinerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- (Ton)						Realisasi Capaian Tahun Ke- (Ton)						Rasio Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	<b>Tujuan :</b>																		
	<b>Meningkatkan Produksi Komoditi perkebunan dan Hortikultra</b>																		
	<b>Perkebunan</b>	<b>215.484</b>	<b>220.541</b>	<b>225.597</b>	<b>212.714</b>	<b>213.738</b>	<b>214.763</b>	<b>221.022</b>	<b>222.549</b>	<b>224.215</b>	<b>216.516</b>	<b>200.907</b>		<b>103</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>102</b>	<b>94</b>	
	Kakao	130.182	135.182	140.182	128.180	129.180	130.180	134.585	115,024	114,003	107,053	104,649	-	103	85	81	84	81	-
	Jambu Mete	23.818	23.820	23.821	23.823	23.824	23.826	25.504	50,861	52,777	51,700	36,285	-	107	214	222	217	152	-
	Kelapa Dalam	39.665	39.670	39.675	39.670	39.674	39.678	41.899	37,528	38,397	39,155	41,457	-	106	95	97	99	104	-
	Cengkeh	12.909	12.956	13.002	12.891	12.901	12.911	5.315	13,420	13,434	9,490	9,316	-	41	104	103	74	72	-
	Lada	8.910	8.913	8.917	5.061	5.065	5.069	13.719	5,716	5,604	5,579	5,949	-	154	64	63	110	117	-
	Kopi	-	-	-	2.673	2.675	2.677	-	-	-	2,776	2,678	-				104	100	-
	Pala	-	-	-	416	419	422	-	-	-	763	573	-				183	137	-
	<b>Hortikultura</b>	<b>35.559</b>	<b>36.874</b>	<b>37.454</b>	<b>38.630</b>	<b>38.980</b>	<b>39.330</b>	<b>91.277</b>	<b>32.732</b>	<b>56.632</b>	<b>42.816</b>	<b>50.574</b>		<b>257</b>	<b>89</b>	<b>151</b>	<b>111</b>	<b>130</b>	
	Bawang Merah	475	880	900	521	571	621	379	390	655	1,015	449	-	80	44	73	195	79	-
	Cabai Rawit	8.904	9.064	9.224	3.611	3.711	3.811	3.377	3,668	3,801	4,286	3,914	-	38	40	41	119	105	-
	Cabai Besar	5.180	5.430	5.630	1.506	1.606	1.706	1.230	1,408	1,962	2,411	2,540	-	24	26	35	160	158	-
	Jeruk	21.000	21.500	21.700	21.890	21.950	22.100	86.291	27,266	50,214	22,219	19,927	-	411	127	231	102	91	-
	Durian	-	-	-	11.102	11.142	11.092	-	-	-	12,885	23,744	-				116	213	-

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura tahun 2018 – 2022 secara rata-rata telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Tujuan Dinas yaitu meningkatkan produksi perkebunan dan hortikultura yang memiliki indikator meningkatkan produksi tanaman unggulan perkebunan dan hortikultura. Untuk komoditi unggulan perkebunan realisasi produksi tahun 2021-2022 sebesar 138% dan 125%, sementara produksi komoditi unggulan hortikultura tahun 2021-2022 sebesar 138% dan 133%. Tercapainya target produksi perkebunan dan hortikultura dalam kurun waktu 2018 – 2022 adalah peran serta petani secara swadaya membudidayakan tanaman serta dukungan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.



Tabel 2.9. (T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Program Tahun 2018-2020																	
A	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.546.066.875	2.037.126.500	1.617.263.000			1.500.005.413	1.918.885.614	1.613.263.000			97,2	94,2	99,75			1,75	-15,92
B	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2.960.117.850	8.320.280.950	923.131.350			2.857.020.080	7.312.162.280	923.131.350			96,52	87,88	100			-12,24	-87,37
C	Peningkatan Disiplin Aparatur	-	64.800.000	6.000.000			-	0	6.500.000					108,33			90,74	
D	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	148.200.000	-			-	125.142.000	-				84,44					
E	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	7.000.000	7.000.000	-			7.000.000	7.000.000	-			100	100					
F	Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan Skpd	8.500.000	11.000.000	2.900.000			8.500.000	11.000.000	2.900.000			100	100	100			-25,46	-73,63
G	Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.073.280.000	1.817.942.500	177.895.000			1.027.809.600	1.766.919.694	177.895.000			95,76	97,19	100			-24,63	
H	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	214.000.000	180.000.000	-			214.000.000	180.000.000	-			100	100				-18,89	-100
I	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Cuna	41.745.000	830.000.000	5.044.000			41.745.000	814.709.000	5.044.000			100	98,16	100			-2,21	-99%
J	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2.789.599.500	9.225.450.050	1.170.216.000			2.781.529.600	9.037.170.820	1.170.216.000			99,71	97,96	100			-8,78	-87,05
K	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	-	447.500.000	-			-	445.490.000	-				99,55					
L	Percepatan Penanganan Covid-19	-	-	2.579.400.000			-	-	2.579.400.000					100				

Dinas Perkebunan dan Hortikultura  
Provinsi Sulawesi Tenggara

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

2.	Program Tahun 2021-2022																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				20.874.634.561	20.225.878.375				20.162.178.450	19.288.977.264				96,59	95,37	-4,33	-1,27
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				17.725.699.995	22.827.004.800				16.235.189.867	21.824.101.700				91,59	95,61	34,42	4,19
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					4.888.957.954					4.599.692.800					94,08		
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian				196.800.000	1.026.010.000				196.300.000	1.026.010.000				99,75			
	Program Penyuluhan Pertanian				61.248.500					61.233.000					99,97	100	422,67	0,25



Selama 5 (lima) tahun terakhir, kinerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara telah berupaya dalam menyelesaikan tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan capaian pada Tabel 2.8. Pada Tabel 2.8 tersebut, menggambarkan capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap sasaran Renstra Tahun 2018 – 2023 dengan dukungan Anggaran APBD pada Tabel 2.9.

### **2.3.2 Pelayanan Terhadap Areal Perkebunan dan Hortikultura**

#### **Perkebunan**

Luas areal tanaman perkebunan di Sulawesi Tenggara kurun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan luas areal. Pada tahun 2018, Luas areal perkebunan Sulawesi Tenggara sebesar tahun 2022 503.154 ha dengan produksi sebesar 217.593 ton, atau rerata penurunan luas areal 0,006% pertahunnya. Penurunan areal perkebunan tersebut sesuai dengan tantangan dan ancaman yang telah dirumuskan sebelumnya. Alih fungsi lahan tidak dapat dihindari karena tuntutan perkembangan jaman, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, Kawasan perumahan menjadikan lahan perkebunan di Sulawesi Tenggara tergerus. Kondisi tersebut tidak dapat dibendung oleh Pemerintah selaku pembuat kebijakan, namun Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang membuat tinggi harapan petani untuk tetap mengusahakan komoditi perkebunan seperti halnya kebijakan bantuan hibah dan dana bergulir



Tabel 2.10. Perkembangan Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2018 - 2022 di Sulawesi Tenggara

No	Jenis Komoditi	2018		2019		2020		2021		2022*	
		Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kakao	254.810	122.988	246.296	115.024	244.655	114.003	236.822	107.053	227.029	104.649
2	Jambu Mete	116.060	36.923	115.468	50.861	115.871	52.777	115.504	51.700	112.414	36.285
3	Kelapa Dalam	56.716	39.388	58.047	37.528	58.269	38.397	58.763	39.155	60.055	41.457
4	Kelapa Hybrida	2.999	3.396	3.079	3.573	3.075	3.556	3.098	3.589	3.141	3.552
5	Cengkeh	31.588	13.237	32.308	13.420	32.485	13.434	33.984	9.490	37.323	9.316
6	L a d a	15.098	5.135	15.757	5.716	15.918	5.604	16.153	5.579	16.638	5.949
7	Kopi robusta	8.575	2.492	8.462	2.765	8.420	2.675	8.877	2.776	9.185	2.678
8	Kopi arabica	0	0	0	0	100	0	200	0	0	0
9	Vanili	492	32	463	33	448	32	447	31	5.695	37
10	P a l a	3.886	534	4.070	599	4.317	710	5.023	763	5.694	574
11	Kemiri	2.919	875	2.798	837	2.738	833	2.693	927	2.604	1.081
12	Enau	3.533	2.649	3.630	2.675	3.480	2.053	3.442	1.982	3.353	1.497
13	Asam Jawa	159	60	144	38	145	46	145	27	78	41
14	Pinang	579	172	581	156	612	161	621	174	576	186
15	Kapuk	924	151	853	174	830	176	827	146	727	143
16	Sagu	4.516	2.710	4.501	2.990	4.398	2.760	4.342	2.705	4.223	3.020
17	Jarak Pagar	6	0	5	0	6	0,02	4	0,00	0	0
18	Kelapa Sawit	6.583	2.372	6.732	4.602	7.524	5.030	7.948	3.950	13.065	6.589
19	Karet	705	33	706	74	720	81	718	159	780	181
20	Tebu	0	0	103,00	153.000	0	0	225,00	0	0	0
21	Nilam	7.644	434.000	5.171	184.580	4.720	544	2.884,00	544,29	5.369	358
<b>Total</b>		<b>517.792</b>	<b>667.147</b>	<b>509.174</b>	<b>578.645</b>	<b>508.731</b>	<b>242.872</b>	<b>502.720</b>	<b>230.750</b>	<b>503.154</b>	<b>217.593</b>

Sumber : Statistik Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara

Ket: \* Angka Sementara

Berdasarkan tabel diatas, kondisi luas areal total Sulawesi Tenggara cukup fluktuatif setiap tahunnya dan cenderung menurun. Fluktuatifnya areal perkebunan dipengaruhi oleh luas tanam dan panen tanaman semusim seperti nilam. Pada tanaman tahunan, beberapa komoditi unggulan Sulawesi Tenggara banyak yang mengalami alih fungsi lahan dan serangan hama penyakit sehingga menyebabkan kehilangan areal yang cukup tinggi. Salah satunya adalah tanaman kakao. Luas areal kakao di Sulawesi Tenggara termasuk yang paling tinggi dibandingkan dengan komoditi lain. Hal ini dikarenakan komoditi kakao merupakan komoditi unggulan dimana hampir setiap Kabupaten bahkan kota di Sulawesi Tenggara tanaman kakao tumbuh subur. Namun tingginya luas areal berdampak pada tingginya serangan hama contohnya yang paling tinggi serangan hama di Sulawesi Tenggara adalah penggerek buah kakao, dan *helopeltis.sp.* Hama ini termasuk yang paling cepat penyebarannya dan bersifat merusak tanaman, sehingga produktivitas tanaman tidak hanya turun, namun berdampak pada rusaknya tanaman kakao. Kebijakan yang dapat ditempuh oleh Dinas perkebunan dan hortikultura adalah dengan intensifikasi dan peremajaan tanaman kakao. Untuk mempertahankan luas areal kakao, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara setiap tahunnya mengalokasikan kegiatan rehabilitasi dan peremajaan tanaman kakao melalui kegiatan APBN dan pengadaan bibit melalui APBD.

### **Hortikultura**

Ragam produksi tanaman hortikultura di Sulawesi Tenggara cukup bervariasi. Untuk tanaman sayuran, terdapat bawang daun, bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, kubis, petsai/sawi, terung, tomat, dan lainnya. Terung, Kangkung, Tomat, Cabai Rawit dan Kacang Panjang menghasilkan produksi yang dominan untuk tanaman sayuran di



Sulawesi Tenggara. Untuk tanaman buah-buahan, pisang, durian dan jeruk siam menjadi tanaman yang banyak dihasilkan di Sulawesi Tenggara, selain tanaman buah buahan lainnya. Produksi ketiga tanaman buahbuahan tersebut masing-masing 494.905 kuintal, 237.446 kuintal, dan 199.271 kuintal. Untuk tanaman biofarmaka, Jeruk nipis, Serai dan Jahe menghasilkan produksi yang dominan untuk tanaman biofarmaka di Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk tanaman hias, anggrek Potong, Heliconia, Sedap Malam dan Anggrek Pot menjadi tanaman hias yang banyak dihasilkan di Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.11. Luas Areal dan Produksi Sayuran Hortikultura Tahun 2018 - 2022 di Sulawesi Tenggara

No	Jenis Komoditi	2018		2019		2020		2021		2022*	
		Luas Lahan (Ha)	Produksi (Kuintal)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Kuintal)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Kuintal)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Kuintal)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Kuintal)
1	Bawang Merah	163	4.908	131	3.900	226	6.550	266	10.153	120,93	4.489,18
2	Bawang Daun	221	4.464	344	3.327	374	3.859	336	5.084	317,34	4.062,30
3	Bayam	1.225	19.592	1.330	21.940	1.464	23.123	1.913	24.365	1.937,1	26.812,48
4	Buncis	147	3.618	179	4.003	115	2.413	200	2.026	198,5000	2.359,41
5	Cabai Besar	431	11.066	539	14.084	582	19.625	1.442	24.112	3.796,52	50.805,08
6	Cabai Rawit	1.387	45.404	1.320	36.686	1.183	38.014	3.778	42.867	4.019,20	39.147,17
7	Jamur	45	355	165	736	27	121	523	16	3.111,85	273,30
8	Kacang Merah	49	495	59	510	16	141	-	-	-	-
9	Kacang Panjang	1.473	36.673	1.709	46.609	1.638	41.735	2.875	43.088	2.614,49	38.210,93
10	Kangkung	1.523	32.722	1.691	35.758	1.824	35.356	2.310	39.510	2.292,29	43.148,77
11	Kembang Kol	15	312	20	278	12	135	16	975	7,35	155,40
12	Ketimun	485	18.719	627	18.388	659	15.988	1.037	21.827	1.006,09	24.342,65
13	Kubis	75	1.513	57	705	52	1.241	35	1.212	77,07	3.647,76
14	Labu Siam	183	9.010	257	7.076	304	7.622	371	8.763	339,0	6.006,95
15	Lobak										
16	Melon	33	1.986	44	2.467	45	2.431	35	3.244	52,15	2.045,20
17	Paprika										
18	Petsai/Sawi	585	10.500	668	10.009	711	9.290	702	11.914	744,78	14.524,38
19	Semangka	240	9.366	351	19.874	353	11.834	308	11.900	412,14	12.530,78
20	Stroberi									5,45	113,
21	Terung	1.133	39.002	1.391	55.342	1.268	56.635	3.039	58.204	2.822,2	52.205,57
22	Tomat	1.259	38.046	1.440	56.084	1.372	47.195	2.529	48.000	2.365,45	41.150,08

Sumber : Statistik Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara

Tabel 2.12. Luas Tanaman dan Produksi Buah Tahun 2018 - 2022 di Sulawesi Tenggara

No	Jenis Komoditi	2018		2019		2020		2021		2022*	
		Tnm. Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Kuintal)	Tnm. Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Kuintal)	Tnm. Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Kuintal)	Tnm. Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Kuintal)	Tnm. Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Kuintal)
1	Alpukat	6.544	5.388	7.600	5.756	11.750	5.200	10.928	5.637	11.081	10.072,26
2	Anggur							174	600	684	799,70
3	Belimbing	7.056	5.065	8.930	6.336	8.525	6.200	3.302	5.041	9.906	5.489,83
4	Duku/Langsat/Kokosan	48.632	29.254	122.826	135.952	81.474	46.613	16.235	11.486	35.434	21.338,72
5	Durian	115.430	62.746	102.649	111.905	117.379	92.435	128.855	40.397	139.804	237.445,68
6	Jambu Air	17.419	17.049	13.188	15.886	18.354	16.606	14.230	16.237	27.239	14.418,59
7	Jambu Biji	13.842	19.536	15.248	20.916	23.687	19.248	13.976	22.737	30.433	18.824,23
8	Jengkol	1.553	1.386	1.259	1.887	2.565	2.567	10.335	6.102	8.561	26.911,20
9	Jeruk Besar	24.801	12.287	19.398	11.971	25.299	12.736	4.084	4.781	29.4159	208.910,16
10	Jeruk Siam/Kepron	862.912	772.321	272.665	410.203	502.140	524.455	222.196	182.186	278.312	199.270,76
11	Mangga	447.633	279.421	193.959	233.460	244.705	209.426	124.053	93.968	167.647	104.740,61
12	Manggis	3.179	3.145	4.121	3.632	8.229	4.220	7.886	4.016	12.374	20.547,15
13	Markisa/Konyal	65	113			1.098	376				
14	Melinjo	714	1.516	1.512	1.886	3.479	2.479	2.308	1.398	3.276	2.677,29
15	Nangka/Cempedak	78.465	49.537	61.834	45.953	77.524	45.869	62.383	40.116	56.586	95.848,11
16	Nenas *)	20.312	200.652	25.659	156.128	97.539	1.010.603	90.733	1.173.931	201.9714	149.328,33
17	Pepaya	117.167	156.554	92.312	142.237	176.291	148.127	105.031	97.462	138.518	152.579,21
18	Petai	8.348	7.960	5.515	6.859	9.498	8.536	5.394	6.459	96.830	8.497,75
19	Pisang *)	420.336	659.073	439.707	679.886	680.267	638.830	416.101	565.990	810.484	494.904,74
20	Rambutan	238.038	159.473	129.850	195.270	153.175	168.231	83.003	112.253	21.9084	137.846,41
21	Salak *)	10.762	34.208	11.788	34.865	30.115	23.973	10.498	28.102	36.116	14.106,87
22	Sawo	2.183	1.919	1.906	1.539	2.739	1.169	3.016	2.451	3.038	1.810,46
23	Sirsak	10.235	17.473	12.010	23.506	16.805	19.779	9.680	19.105	25.263	10.141,51
24	Sukun	17.390	16.243	17.472	18.644	39.204	19.194	18.672	11.207	21.289	22.373,29

Sumber : Statistik Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara

Ket: \* Angka Sementara

Tabel 2.13. Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Hias Tahun 2017 - 2022 di Sulawesi Tenggara

NO.	Jenis Komoditi	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022*	
		Luas Panen (M <sup>2</sup> )	Produksi (Tangkai)	Luas Panen (M <sup>2</sup> )	Produksi (Tangkai)	Luas Panen (M <sup>2</sup> )	Produksi (Tangkai)	Luas Panen (M <sup>2</sup> )	Produksi (Tangkai)	Luas Panen (M <sup>2</sup> )	Produksi (Tangkai)	Luas Panen (M <sup>2</sup> )	Produksi (Tangkai)
1	Anggrek	4.178	6.654	1.487	7.186	3911	14.972	4.259,00	7.036,00	2000	4091	2286	2429
2	Anthurium Bunga	1.202	1.378	358	1.047	1700	6.271	2.593,00	6.118,00	726	995	1181	1272
3	Anyelir	412	632	140	265	275	999	104,00	109,00	0	0	0	0
4	Gerbera (Herbras)	468	1.323	200	427	192	460	276,00	291,00	532	777	1072	1307
5	Gladiol	885	1.553	170	916	205	247	246,00	261,00	0	0	0	0
6	Heliconia	2.836	5.613	1.104	1.735	1563	3.452	1.571,00	2.947,00	1802	2990	2136	2613
7	Krisan	79	273	178	411	20	20	48,00	71,00	12	92	561	1327
8	Mawar	891	1.725	785	2.768	1014	3.976	966,00	1.542,00	1178	2283	1848	2317
9	Sedap Malam	397	1.020	116	513	1035	7.359	1.179,00	1.563,00	616	1602	2229	2457
10	Dracaena	654	1.314	172	312	338	401	182,00	487,00	635	887	833	912
11	Melati	1.597	1.672	510	801	3587	1.895	1.275,00	1.112,00	879	761	1606	1730
12	Palem	3.333	3.481	2.640	4.101	2896	8.380	5.980,00	10.968,00	1122	1948	1027	1183
13	Aglaonema	1.434	1.916	443	1.299	443	1.299	1.223,00	1.468,00	914	1319	1053	1300
14	Adenium	0	4.993	2.141	8.099	2141	8.099	792,00	1.487,00	0	0	0	0
15	Euphorbia	2.331	2.594	633	1.738	1229	1.858	734,00	817,00	0	0	0	0
16	Phylodendron	641	889	102	137	76	319	109	146	120	120	358	409
17	Pakis	1303	1602	651	1041	2231	3687	825	1332	704	1370	954	1272
18	Monstera	564	569	150	359	230	360	488	599	0	0	0	0
19	Ixora (Soka)	3922	5597	1283	3544	2237	5572	1157	1852	1463	1628	614	845
20	Cordyline	520	681	97	213	220	220	90	210	165	165	552	579
21	Diffenbachia	917	1057	198	400	205	272	202	157	0	0	0	0
22	Sansevieria	1403	2123	614	4006	1600	1972	562	663	1164	1724	1358	1559
23	Anthurium Daun	1912	2299	649	5763	1515	2160	774	1234	0	0	0	0
24	Caladium	1452	1592	346	747	663	933	433	725	0	0	0	0
25	Anggrek Pot									1067	1624	2286	2429
26	Bromelia									200	250	115	229
27	Bugenvil									370	567	303	550
28	Puring									688	1097	1030	1559

Sumber : Statistik Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara  
Ket: \* Angka Sementara

Tabel 2.14. Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Biofarmaka Tahun 2017 - 2022 di Sulawesi Tenggara

NO.	Jenis Komoditi	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022*	
		Luas Panen (M <sup>2</sup> )	Produksi (Kg)	Luas Panen (M <sup>2</sup> )	Produksi (Kg)	Luas Panen (M <sup>2</sup> )	Produksi (Kg)	Luas Panen (M <sup>2</sup> )	Produksi (Kg)	Luas Panen (M <sup>2</sup> )	Produksi (Kg)	Luas Panen (M <sup>2</sup> )	Produksi (Kg)
1	Jahe	1.782.082	1.144.174	3.606.043	17.410.535	477.622,00	1.300.534	576.220,00	731.267,00	931522	922195	500300	332246
2	Laos/Lengkuas	76.393	183.717	78.393	167.695	180.164,00	377.821	165.971,00	176.817,00	140642	196032	95072	156949
3	Kencur	33.469	35.104	36.818	80.745	59.339,00	78.646	36.656,50	35.430,00	15298	16626	65774	69072
4	Kunyit	97.610	172.154	70.267	143.710	275.290,00	637.795	124.398,00	122.212,00	68804	107851	71514	103856
5	Lempuyang	1.442	1.216	1.149	1.545	2.969,00	5.281	5.823,00	5.090,00	2928	4545	2479	2012
6	Temulawak	18.035	41.681	8.591	10.245	53.303,00	64.849	57.784,00	32.753,00	64123	32774	65073	21610
7	Temuireng	5.999	12.227	4.481	5.811	41.564,00	52.294	24.147,00	18.151,50	13221	14955	16583	13874
8	Temukunci	1.600	1.423	1.543	1.489	2.883,00	4.241	4.439,00	3.323,00	1189	765	15863	6943
9	Dlingo/Dringo	665	814	1.565	1.378	1.565,00	1.378	1.295,00	1.149,00	0	0	0	0
10	Kapulaga	41	21	502	514	1.129,00	1.405	3.522,00	2.840,00	485	329	1395	1006
11	Mengkudu/Pace *)	3.256	6.376	6.138	27.939	11.086,00	18.928	14.099,00	33.323,00	5275	7056	4361	11522
12	Mahkota Dewa	7.160	94.457	7.319	276.626	1.867,00	66.113	4.361,00	53.826,00	2419	31819	2381	29256
13	Kejibeling	3.478	3.801	2.291	2.012	42.462,00	41.775	33.125,00	21.452,00	0	0	0	0
14	Sambiloto	2.087	1.258	1.434	952	6.317,00	7.736	6.740,00	5.527,00	4116	2207	3543	2999
15	Lidah Buaya	796	599	734	1.136	2.364,00	3.906	4.729,00	3.725,00	2979	2436	1824	2193
16	Jeruk Nipis									35365	223497	104157	560989
17	Rimpang									1194959	1295743	791245	706562
18	Serai Hijau									123716	378790	123588	388399

Sumber : Statistik Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara

Ket: \* Angka Sementara



### 2.3.3 Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sub sektor perkebunan merupakan penyumbang nilai tertinggi pada kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yakni sebesar 55,01 persen. PDRB dari golongan tanaman perkebunan dengan nilai 9,674 Triliun Rupiah dihitung atas dasar harga berlaku. Dari nilai tersebut kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 6,29 persen. Pada Tahun 2022 atas dasar harga konstan pertumbuhan PDRB sektor perkebunan mengalami pertumbuhan positif 7,69 persen.

Sub sektor hortikultura yang merupakan salah satu lapangan usaha penyumbang 7,85 persen PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 1,380 Triliun rupiah pada tahun 2022 atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDRB sektor tanaman hortikultura mengalami pertumbuhan positif 1,03 persen, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.15. Kontribusi Perkebunan dan Hortikultura terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021*	2022* *
<b>Perkebunan</b>						
1	Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan ADHB(Juta Rupiah)	7.430,81	8.140,79	8.184,88	8.618,62	9.674,28
2	Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan ADHB(Juta Rupiah)	5.960,64	6.372,80	6.130,55	6.283,17	6.766,13
3	Pertumbuhan PDRB golongan tanaman perkebunan ADHK (persen)	8,72	6,91	-3,80	2,49	7,69
4	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan terhadap Sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (persen)	52,20	52,85	52,42	52,91	55,01
<b>Hortikultura</b>						
1	Nilai PDRB Sub Sektor Hortikultura ADHB(Juta Rupiah)	1.119,18	1.241,04	1.256,32	1.306,38	1.380,73
2	Nilai PDRB Sub Sektor Hortikultura ADHB(Juta Rupiah)	965,32	1.022,36	995,15	1.002,22	1.012,51
3	Pertumbuhan PDRB golongan tanaman hortikultura ADHK (persen)	5,50	5,91	-2,66	0,71	1,03

4	Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura terhadap Sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (persen)	7,88	8,05	8,08	8,05	7,86
---	--	------	------	------	------	------

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara Dalam Angka Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

**Ket: \* Angka sementara**  
**\*\* Angka sangat sementara**

Tabel 2.15. menunjukkan melambatnya struktur perekonomian Sulawesi Tenggara menurut lapangan usaha dan terendah terjadi pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemic covid-19, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial yang berakibat ada menurunnya laju perekonomian. Pada Tahun 2020 atas dasar harga konstan pertumbuhan PDRB sektor perkebunan mengalami pertumbuhan negatif – 3,37 persen, dan sektor tanaman hortikultura mengalami pertumbuhan negatif – 2,66 persen. Pasca pandemi covid-19 yaitu tahun 2021 dan 2022 laju pertumbuhan perekonomian mulai mengalami peningkatan.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperlukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode 2018-2023 terutama dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan perkebunan dan hortikultura Sulawesi Tenggara kedepannya, seperti jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Selanjutnya dari analisis : 1) sasaran tahun 2018 dan capaian tahun 2018 terhadap Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023; 2) terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2019-2024 dan; 3) terhadap Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa peningkatan



produksi dan produktivitas perkebunan dan hortikultura Sulawesi Tenggara berdampak terhadap capaian secara nasional. Hal tersebut ditunjukkan oleh kontribusi produksi kakao Sulawesi Tenggara tahun 2022 ± 15,16% terhadap produksi nasional, jambu mete 30,42% terhadap produksi nasional, kelapa 1,39% terhadap produksi nasional, cengkeh 7,26% terhadap produksi nasional, lada 7,43% terhadap produksi nasional, kopi 0,36% terhadap produksi nasional, pala 1,95% terhadap produksi nasional, untuk sub sektor hortikultura komoditi bawang merah berkontribusi terhadap nasional sebesar 0,02%, cabai berkontribusi 0,23% terhadap produksi nasional, jeruk 0,92% terhadap produksi nasional, durian 2,06% terhadap produksi nasional.

Adapun analisis terhadap Rencana Pola Ruang untuk kawasan budi daya sebagaimana dijelaskan didalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2014—2034 pasal 27, meliputi : a) kawasan kawasan lindung; b) kawasan budi daya.

Kawasan budi daya provinsi sebagaimana diuraikan pada pasal 34 ayat 3 poin c adalah kawasan peruntukan pertanian selanjutnya diuraikan pada pasal 37 ayat 3 dan 4 adalah (ayat 3) kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di setiap kabupaten/kota dengan komoditi tanaman buah-buahan, sayuran, florikultura dan tanaman obat. (ayat 4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di setiap kabupaten/kota dengan komoditi unggulan meliputi kakao, jambu mete, kopi, kelapa, kelapa sawit, cengkeh dan sagu.

Kawasan peruntukan pertanian tersebut merupakan strategi pemerintah untuk mempertahankan lahan perkebunan dan hortikultura berkelanjutan serta peningkatan produksi pertanian guna menjaga ketahanan pangan. Pada satu sisi, tanaman perkebunan/hortikultura yang saat ini produktif harus berbagi lahan dengan padi dan jagung. Dewasa ini petani bebas menentukan jenis komoditi yang diusahakan oleh karena berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman lebih detailnya ada pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman yang diusahakan. Namun kebebasan dalam

hal ini petani berkewajiban berperanserta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman dan perribudidayanya. Apabila pilihan berbudidaya tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu. Melalui Program Pembangunan perkebunan yang berkelanjutan, strategi pemerintah diharapkan mampu bersaing di tengah dinamika perubahan lingkungan strategis nasional maupun internasional terutama menghadapi tantangan dengan membanjirnya produk import. Tantangan dan peluang pengembangan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode 2024-2026 mendatang :

#### 1. Penyediaan Bahan Baku Industri yang berkualitas

Penduduk Sulawesi Tenggara berdasarkan data BPS tahun 2022 mencapai 2.701.700 jiwa. Di lain pihak, eksisting dan ketersediaan lahan perkebunan cenderung terus menurun karena degradasi, alih fungsi lahan, perumahan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya. Jadi jelaslah bahwa tantangan bagi sektor pertanian adalah bagaimana memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya alam dan ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi produk perkebunan dan hortikultura sebagai bahan baku industri tetap konsisten. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan adanya perubahan preferensi konsumen maka penerapan teknologi tepat guna yang inovatif dan progresif menjadi suatu kewajiban produk hasil perkebunan dan hortikultura akan menjadi tantangan yang nyata sekaligus memberi peluang untuk menghasilkan produksi yang berkelanjutan.

#### 2. Dampak Perubahan Iklim Global

Perubahan pola dan intensitas curah hujan merupakan terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Bergesernya pola tanam, eksplosif serangan hama dan penyakit tanaman yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produktivitas tanaman. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan

kemampuan petani, petugas lapangan dan koordinasi pemerintah dengan BMKG dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan.

### 3. Tingkat Daya Saing dan Nilai Tambah Produk Perkebunan dan Hortikultura

Sejalan dengan pemberlakuan pasar bebas yang saat ini pola pemasaran sudah menggunakan digitalisasi, produk perkebunan dan hortikultura juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian. kondisi wilayah seperti Sulawesi Tenggara, persaingan penggunaan lahan relatif ketat, terutama dengan pemukiman dan pertambangan, areal perkebunan dan hortikultura umumnya mulai tergeser ke wilayah-wilayah yang kurang produktif. Pergeseran ini akan diikuti oleh penurunan produktivitas. Pada kondisi seperti ini, peningkatan produktivitas, pengolahan hasil serta penanganan pasca panen memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak.



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024 – 2026 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2018 – 2023. Namun demikian, guna penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan dan hortikultura yang lebih baik kedepannya maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan permasalahan mendasar yang menghambat capaian kinerja. Pembangunan perkebunan dan hortikultura tidak terlepas dari permasalahan dan pengaruh isu – isu strategis yang ada, baik lingkungan internal yaitu pada tingkat regional Sulawesi Tenggara maupun lingkungan eksternal yaitu pada tingkat nasional bahkan sampai pada tingkat internasional. Beberapa persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan dan hortikultura di masa yang akan datang khususnya tahun 2024 - 2026, mencakup aspek : kerusakan lingkungan, perubahan iklim, infrastruktur, keterbatasan sarana prasarana, kepemilikan dan alih fungsi lahan, rendahnya penggunaan benih bersertifikat, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, lemahnya kelembagaan kelompok tani, kurang optimalnya keterpaduan antar sektor serta rendahnya adaptasi teknologi terhadap budidaya dan pemasaran.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menjelaskan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran. Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang menyatakan bahwa hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2022,



tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara maka tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pertanian dan tugas pembantuan. Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi pembangunan perkebunan dan hortikultura dilakukan melalui : 1) Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (Tabel 3.1); dan 2) Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara (Tabel 3.2).

Tabel 3.1 Matriks SWOT Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara

<b>Matriks SWOT</b>			
<b>KEKUATAN (S)</b>		<b>KELEMAHAN (W)</b>	
1	Berkembangnya beberapa kawasan Perkebunan dan Hortikultura	1	Rendahnya SDM dalam budidaya, penanganan hama dan penerapan teknologi
2	Keberpihakan pemerintah cukup tinggi dalam regulasi, pembinaan, pengawasan dan pelayanan publik	2	Rendahnya ketersediaan prasarana (infrastruktur), sarana pertanian lainnya termasuk sarana produksi
3	Potensi Lahan dan iklim yang mendukung untuk berbudidaya tanaman perkebunan dan hortikultura	3	Rendahnya ketersediaan prasarana (infrastruktur), sarana pertanian lainnya termasuk sarana produksi
4	Berkembangnya kelompok tani Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera yang mengarah ke sektor hilirisasi	4	Lemahnya pengawasan peredaran benih tidak bersertifikat
		5	Banyaknya tanaman tua dan tidak produktif
		6	Terbatasnya ketersediaan benih unggul bersertifikat siap tanam
		7	Rendahnya pengetahuan dan informasi akan pengembangan usaha serta akses pasar dari hasil panen
		8	Minimnya antisipasi terhadap bencana dan gangguan usaha perkebunan
<b>PELUANG (O)</b>		<b>ANCAMAN (T)</b>	
1	Strategisnya letak Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan kemudahan akses pasokan benih dan pemasaran produk petani	1	Tingginya alih fungsi lahan menjadi non pertanian
2	Terbukanya pasar domestik maupun ekspor produk hasil perkebunan dan hortikultura	2	Penggunaan Bahan Kimia yang berlebihan
3	Tingginya minat petani untuk mengusahakan komoditi perkebunan dan hortikultura	3	Beberapa komoditi spesifik lokal sudah punah karena kehilangan daya saing ekonomi dan ketidakpastian pasar
4	Harga jual komoditi perkebunan dan	4	Berkurangnya minat tenaga kerja

	hortikultura yang relatif stabil jika dibandingkan dengan komoditi pangan		muda di sektor pertanian pada kawasan pedesaan
		5	Serangan OPT dan Dampak Fenomena Iklim terhadap pertanaman
		6	Meningkatkannya bahan baku olahan dan produk impor perkebunan dan hortikultura dipasar domestik

Analisis pada Tabel 3.1. ini didasarkan pada logika pemahaman untuk memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), dengan meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats) terhadap pembangunan pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya dengan mempertimbangkan faktor lingkungan internal kekuatan dan kelemahan dan serta lingkungan eksternal peluang dan ancaman yang dihadapi serta membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan strategik sebagai strategi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara dalam tiga tahun kedepan.

Strategi SO (Kekuatan – Peluang)

1. Optimalisasi potensi perkebunan dan hortikultura termasuk pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi komoditas strategis ;
2. Optimalisasi kawasan sentra produksi untuk pengembangan agroindustry perkebunan dan hortikultura;
3. Peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing produk perkebunan dan hortikultura;
4. Peningkatan akses pasar dan pemberdayaan kelembagaan / kelompok masyarakat .

Strategi WO (Kelemahan – Peluang)

1. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani melalui pelatihan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan petani terhadap teknologi pertanian dari hulu-hilir dan pemasaran produk perkebunan dan hortikultura;



2. Optimalisasi bantuan prasarana dan sarana perkebunan dan hortikultura;
3. Sosialisasi terkait pentingnya benih bersertifikat dan meningkatkan pengawasan peredaran benih perkebunan dan hortikultura;
4. Optimalisasi studi banding manajerial dalam rangka penguatan kelembagaan kelompok .

Strategi ST (Kekuatan – Ancaman)

1. Peningkatan kapasitas petani menerapkan manajemen budidaya GAP dan GMP;
2. Pemanfaatan fungsi lahan perkebunan dan hortikultura sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah sesuai dengan Kawasan perkebunan nasional maupun provinsi;
3. Peningkatan posisi tawar petani melalui jaminan pasar dan informasi yang up to date ;
4. Peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui pembinaan petugas lapangan, penyuluhan, kemitraan ;
5. Peningkatan Sekolah Lapang Hama Penyakit dan Agribisnis Perkebunan dan hortikultura;
6. Melakukan kajian akan kebutuhan industri akan komoditi perkebunan dan hortikultura;
7. Pembagian kewenangan dengan OPD Kabupaten akan pengelolaan alokasi bantuan prioritas Provinsi dengan Kabupaten.

Strategi WT (Kelemahan – Ancaman)

1. Sosialisasi tentang pentingnya penggunaan benih tanaman perkebunan dan hortikultura bersertifikat;
2. Peningkatan budidaya dengan mengutamakan penggunaan bahan-bahan organik;
3. Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana termasuk sarana produksi untuk peningkatan produktivitas ;



4. Peningkatan Akses pasar dan pendapatan petani serta penguatan kelembagaan ekonomi petani.

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Belum optimalnya sistem budidaya tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budidaya tanaman tidak sesuai GAP</li> <li>- Tingginya alih fungsi lahan - Banyaknya tanaman rusak/gagal panen</li> <li>- Rendahnya penerapan teknologi budidaya, pengendalian hama dan antisipasi perubahan iklim (adopt teknologi)</li> <li>- Minimnya SDM, usia produktif dan kesadaran Petani</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan lahan perkebunan dan hortikultura</li> </ul>
	Belum optimalnya penanganan hama penyakit tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya penerapan penanganan dan pengendalian hama serta antisipasi perubahan iklim (adopt technology)</li> <li>- Minimnya SDM dan kesadaran petani terhadap dampak serangan hama</li> <li>- Minimnya antisipasi terhadap bencana dan gangguan usaha perkebunan dan hortikultura</li> <li>- Penggunaan Bahan Kimia yang berlebihan</li> </ul>
	Belum optimalnya penggunaan benih unggul bersertifikat	Rendahnya kesadaran petani menggunakan benih bersertifikat
	Belum optimalnya ketersediaan benih unggul bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya ketersediaan benih unggul bersertifikat siap tanam - Kurangnya kepastian pasar benih unggul</li> <li>- Kurangnya penerapan teknologi pengembangan benih unggul</li> <li>- kurangnya komunikasi yang baik antara petani dengan produsen benih/penangkar</li> </ul>
	Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya kemampuan manajerial SDM perkebunan dan hortikultura</li> <li>- Rendahnya pengetahuan dan informasi akan</li> </ul>

	perkebunan dan hortikultura	pengembangan usaha serta akses pasar dari hasil panen
--	-----------------------------	---

Potensi perkebunan dan hortikultura terutama komoditi kakao dan jambu mete menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai provinsi yang berkontribusi sangat besar terhadap produksi nasional. Berdasarkan tabel 2.5. dapat disimpulkan bahwa produksi total tanaman perkebunan dan hortikultura Sulawesi Tenggara cenderung mengalami penurunan oleh karena beberapa komoditi tanaman perkebunan kehilangan areal akibat dampak dari alih fungsi lahan. Secara keseluruhan masalah pokok perkebunan dan hortikultura Sulawesi Tenggara yaitu Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan dan Hortikultura. Masalah pokok tersebut dijabarkan menjadi beberapa masalah yaitu belum optimalnya sistem budidaya tanaman, belum optimalnya penanganan hama penyakit tanaman, belum optimalnya penggunaan benih unggul bersertifikat, Belum optimalnya ketersediaan benih unggul bersertifikat dan belum optimalnya pengolahan dan pemasaran produk perkebunan dan hortikultura.



**3.2. Telaahan, Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Telaahan antara Renstra Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura, Ditjen PSP dan Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura penting dilakukan untuk mengoptimalkan potensi Sulawesi Tenggara serta mensinkronkan kebijakan dan program pusat dan daerah. Keterkaitan Renstra Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura, Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI dengan Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara pada akhirnya mendukung agenda prioritas nasional yang tersaji pada table berikut :

Tabel 3.3.Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional, RENSTRA Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura, Ditjen PSP dan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

NAWA CITA Ke-2	RENSTRA KL	RPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 - 2029	Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura 2024 - 2029
<p>Agenda Prioritas (NAWA CITA Ke-2) yang terkait dengan pembangunan pertanian adalah Agenda 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; Melalui Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan</li> <li>- Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital</li> </ul>	<p><b>Renstra Ditjen Perkebunan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik melalui peningkatan kedaulatan pangan</li> <li>2. Peningkatan agroindustri berbasis komoditas perkebunan dengan sasaran produksi</li> </ol> <p><b>Renstra Ditjen Hortikultura:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kesejahteraan Petani hortikultura</li> <li>2. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing hortikultura</li> <li>3. Mewujudkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura</li> </ol>	<p>Prioritas 3: Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pemerataan pembangunan, fokus pada mendorong transformasi ekonomi pada sektor pariwisata, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan hilirisasi pertambangan serta program padat karya untuk menyerap tenaga kerja</p>	<p>Peningkatan nilai tambah produksi dan produktivitas sub sektor perkebunan dan hortikultura unggulan daerah</p>

NAWACITA Ke-2 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2019 – 2024 mengamanatkan Kementerian Pertanian untuk berkewajiban dan

bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran pokok sub agenda prioritas Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2019 - 2024. Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan ada keterkaitan dari agenda prioritas nasional hingga Renstra dari Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata diterjemahkan melalui RENSTRA Ditjen Perkebunan dan Hortikultura yaitu peningkatan inovasi dan investasi berbasis komoditas perkebunan dan hortikultura dengan sasaran produksi. RPD Sulawesi Tenggara ditegaskan pada prioritas tiga (3) yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pemerataan pembangunan, fokus pada mendorong transformasi ekonomi pada sektor pariwisata, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan hilirisasi pertambangan serta program padat karya untuk menyerap tenaga kerja. Pada RENSTRA Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan strategi meningkatkan nilai tambah produksi dan produktivitas sub sektor perkebunan dan hortikultura unggulan daerah.

Strategi tersebut dilanjutkan kedalam arah kebijakan Dinas yaitu Penerapan Budidaya Tanaman sesuai GAP, pengalokasian Bantuan sarana dan prasarana, kebijakan pengembangan (ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman), penerapan inovasi dan adopsi teknologi, Pengendalian Gangguan Komoditas Perkebunan dan Hortikultura, upaya peningkatan Pengawasan peredaran benih bersertifikat, penyediaan benih tanaman perkebunan dan hortikultura, optimalisasi pembinaan dan penguatan kelompok tani serta Pengembangan Inovasi dan Adopsi teknologi pengolahan.

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam tiga tahun mendatang dengan indikasi program pemanfaatan ruang sebagai berikut : 1)

Prasarana dan Sarana Pertanian; 2) Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan dan Hortikultura; 3) Perlindungan tanaman perkebunan dan Hortikultura; 4) Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan dan Hortikultura; 5) Penyediaan benih bersertifikat dan pengawasan peredaran benih.

Mengacu Perda Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014-2034 pada pasal 6 dijelaskan bahwa strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas terdiri atas: a. menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan secara proporsional; b. mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung aksesibilitas dan pusat-pusat pertumbuhan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan terhadap pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal; c. mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain; dan d. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta peternakan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pengembangan kawasan sektor pertanian tidak berdiri sendiri, namun lebih merupakan keterpaduan dari berbagai program dan kegiatan pengembangan antar sektor/subsektor, antar institusi, dan antar pelaku usaha yang telah ada di daerah, yang terfokus di kawasan. Pada hakekatnya pengembangan sektor pertanian merupakan kerjasama dari setiap pelaku usaha, termasuk di dalamnya adalah kontribusi dari berbagai sektor terkait, seperti perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pekerjaan umum, pusat penelitian, perguruan tinggi, swasta, asosiasi, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan kebutuhan, aspirasi dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan pembangunan pertanian di kawasan, maka secara garis besar strategi pengembangan kawasan pertanian dapat dirumuskan mencakup: (1)

penguatan perencanaan pengembangan kawasan; (2) penguatan kerjasama dan kemitraan; (3) penguatan sarana dan prasarana; (4) penguatan sumber daya manusia; (5) penguatan kelembagaan; dan (6) percepatan adopsi teknologi pengembangan industri hilir.

Kawasan peruntukan perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan secara nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional untuk Provinsi Sulawesi Tenggara adalah kawasan kakao, jambu mete, lada, kelapa, kopi, cengkeh, cabai, bawang merah dan jeruk.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, menyebutkan bahwa Permasalahan, isu Strategis Daerah, Tujuan dan Sasaran dirumuskan dengan mengakomodir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs). TPB / SDGs merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, yang keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi turut berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus memberikan sumbangan terhadap komitmen global hingga tahun 2030. RAD TPB/SDGs Provinsi mempunyai 17 (tujuh belas) tujuan dan pertanian terlibat pada tujuan ke-dua, yaitu Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

### **3.4. Penetapan Isu-isu Strategis**

Isu strategis perkebunan dan hortikultura tidak lepas dari identifikasi masalah berdasarkan dinamika nasional maupun internasional yang terjadi saat ini dan antisipasi isu yang berkembang dan berpotensi mempengaruhi kondisi perkebunan dan hortikultura pada masa mendatang. Dinamika internasional

yang terjadi saat ini adalah Pertumbuhan penduduk dunia semakin pesat yang diikuti makin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, berdampak pada makin terbatasnya ketersediaan pangan dunia sementara perdagangan bebas dan daya saing produk menuntut SDM kita untuk mampu beradaptasi dan masuk untuk menjadi bagian pelaku dari sistem pasar tersebut.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara turut berperan aktif dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2024-2026, terdapat 19 indikator sasaran yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 4 dari TPB/SDGs. Khusus pada isu Kontribusi PDRB, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menempatkan kontribusi PDRB tersebut pada tujuan yang ke- 3, yakni “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan.”

Berdasarkan pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, sub sektor perkebunan merupakan penyumbang nilai tertinggi pada kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yakni sebesar 55,01 persen. PDRB dari golongan tanaman perkebunan dengan nilai 9,674 Triliun Rupiah dihitung atas dasar harga berlaku. Dari nilai tersebut kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 6,29 persen. Pada Tahun 2022 atas dasar harga konstan pertumbuhan PDRB sektor perkebunan mengalami pertumbuhan positif 7,69 persen.

Sub sektor hortikultura yang merupakan salah satu lapangan usaha penyumbang 7,85 persen PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 1,380 Triliun rupiah pada tahun 2022 atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDRB sektor tanaman hortikultura mengalami pertumbuhan Positif 1,03 persen.

Pada awal tahun 2020 hingga memasuki awal tahun 2021, dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat diberbagai sektor tak terkecuali perkebunan dan hortikultura. Namun imbas yang dirasakan



adanya pandemi tidak sebesar pada sektor lain seperti pariwisata, infrastruktur, UMKM dll. Hal ini dikarenakan sub sektor perkebunan dan hortikultura pengusahaannya dilakukan pada wilayah pedesaan yang tidak terlalu padat yang secara alamiah tidak menyebabkan kerumunan orang dalam jumlah besar. Sehingga kondisi tersebut tidak akan mengganggu penanganan pada sektor budidaya dan produksi saat panen. Kondisi yang cukup rentan ada pada perdagangan saat panen. Kondisi pasar dunia maupun domestik berlangsung diluar kebiasaan normal.

Petani di desa-desa juga akan menghadapi tantangan mengakses pasar untuk menjual produk mereka atau membeli bahan baku pertanian seperti pupuk, benih dan pestisida karena keterbatasan suplai dan transportasi. Pembatasan transportasi dan langkah-langkah karantina cenderung menghambat akses petani ke pasar. Berkurangnya permintaan oleh pasar dapat menghasilkan perubahan signifikan yang dapat menghasilkan efek domino di seluruh rantai perdagangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga jual. Efek domino yang membuat perilaku pasar diluar kebiasaan normal, ternyata membuat pasar internasional mengalami peningkatan permintaan.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026. Selanjutnya ditetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perkebunan dan Hortikultura periode 2024-2026. Tujuan Pembangunan Perkebunan dan Hortikultura yang ingin dicapai yaitu : Meningkatkan Nilai Tambah Produksi dan Produktivitas sub sektor Perkebunan dan Hortikultura, sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan Pembangunan Perkebunan tersebut adalah Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura Unggulan Daerah.

Tabel 4.1 (T-C.25) Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Perkebunan dan Hortikultura

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
					2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Nilai Tambah Produksi dan Produktivitas sub sektor Perkebunan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura Unggulan Daerah	<b>Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan</b>	Ton	<b>208.229</b>	<b>208.553</b>	<b>208.884</b>	
			Kakao		104.754	104.806	104.859	
			Jambu Mete		36.321	36.339	36.358	
			Kelapa Dalam		39.335	39.374	39.414	
			Cengkeh		9.410	9.457	9.504	
			L a d a		5.531	5.559	5.586	
			Kopi robusta		2.705	2.718	2.732	
			P a l a		633	664	698	
			Kelapa Sawit		6.721	6.789	6.857	
			Sagu		2.819	2.847	2.876	
			<b>Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura</b>		Ton	<b>52.009</b>	<b>52.247</b>	<b>52.484</b>
			Bawang Merah			458	463	468
			Cabai Rawit			3.923	3.927	3.931
			Cabai Besar			2.545	2.548	2.550
			Jeruk			21.100	21.206	21.312
Durian	23.983	24.103	24.223					

Berdasarkan tabel 4.1 tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, target produksi tanaman perkebunan tahun 2024 - 2026 sebesar 208.229 Ton – 208.884 Ton, dari total produksi 9 komoditi unggulan Sulawesi Tenggara yaitu : kakao, kelapa, kopi, jambu mete, lada, pala, kelapa sawit dan sagu . Sementara target produksi tanaman hortikultura sebesar 52.009 - 52.484 Ton dari total 5 komoditi unggulan hortikultura yaitu, bawang merah, cabai rawit, cabai besar, jeruk dan durian.

Perkembangan produksi sub sektor perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara sangat dipengaruhi oleh intervensi dari Pemerintah. Berdasarkan hasil dari monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan, bentuk swadaya mandiri oleh kelompok tani dalam berbudidaya sangat minim sekali skala pelaksanaannya di Sulawesi Tenggara. Produksi sangat dipengaruhi oleh luasan komoditi tertanam. Perluasan wilayah tanam berdasarkan potensi pengembangan perkebunan dan hortikultura Sulawesi Tenggara sangat bergantung dari kegiatan Pemerintah yang berupa bantuan bibit/benih, pupuk dan sarana prasarana on farm. Hasil analisis berdasarkan pola tanam, komoditi tanaman semusim hortikultura yaitu cabai dan bawang merah dapat dilakukan perhitungan pada tahun berjalan, namun kondisi tersebut berbeda pada komoditi tanaman tahunan perkebunan dan hortikultura. Tanaman tahunan perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, pala, cengkeh, jambu mete, kelapa sawit, sagu, lada dan komoditi tanaman tahunan hortikultura seperti jeruk dan durian, hasil perhitungan produksi hasil intervensi dari pemerintah dapat dirasakan 4-8 tahun kemudian. Sehingga perhitungan peningkatan produksi pada sub sektor perkebunan dan hortikultura buah tahunan berdasarkan intervensi pemerintah tidak terlihat secara langsung dampaknya pada saat penentuan jumlah produksi setiap tahunnya. Peningkatan produksi yang dapat terlihat secara langsung dampaknya pada saat menentukan jumlah produksi setiap tahunnya adalah sub sektor hortikultura tanaman cabai dan bawang merah.

## 4.2. CASECADING



Berdasarkan tujuan dan sasaran resntra tersebut di atas, maka langkah - langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam casecading kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Hortikultura guna meningkatkan nilai tambah produksi perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara dalam Tabel 4.2 sebagai berikut :



**Tabel. 4.2**  
**CASECADING KINERJA H DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen							
.3.01. Mewujudkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Persen	Tujuan : Meningkatkan Nilai Tambah Produksi dan Produktivitas sub sektor Perkebunan dan Hortikultura	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Persen				
			Sasaran : Meningkatnya produksi tanaman perkebunan dan hortikultura unggulan daerah	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Laporan Sarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan</b>	<b>Laporan</b>
				Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	<b>Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian</b>	<b>Jumlah pengawasan peredaran sarana pertanian yang dilaksanakan</b>	<b>Laporan</b>
						Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya pengawasan peredaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksana pengawasan peredaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen
						Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Terlaksananya pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Laporan
						Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terlaksananya pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Laporan
						Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Terlaksananya pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Laporan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

					Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terlaksananya pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Laporan
					<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	<b>Terlaksananya pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan dan Hortikultura</b>	<b>Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan dan Hortikultura</b>	<b>Laporan</b>
					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terlaksananya Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat
					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan
					Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tersedia Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan
					Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tersedia Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang
					Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Tersedia Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata
					Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Tersedia Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek
					Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Tersedia Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Gram
					Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedia Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang
					Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Tersedia Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton
					<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Laporan Prasarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan</b>	<b>Laporan</b>
					<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>Terlaksananya penataan prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah penataan prasarana yang dilaksanakan</b>	<b>Laporan</b>
					Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan	Dokumen



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

						Usaha Tani	Usaha Tani		
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen
						Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Tersedianya Bangunan Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Tersedianya Bangunan Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan prasarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit
						Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	ha
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit
						<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Terlaksananya Pengendalian penanggulangan Bencana Perkebunan dan Hortikultura</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian penanggulangan Bencana Perkebunan dan Hortikultura yang dilaksanakan</b>	<b>Laporan</b>
						<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Pengendalian Bencana Perkebunan dan Hortikultura</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian Bencana Perkebunan dan Hortikultura</b>	<b>Laporan</b>
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha
						Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

					Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha
					Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terlaksananya Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan
					<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Terlaksana penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura</b>	<b>Jumlah Laporan penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura</b>	<b>Laporan</b>
					<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedia Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Izin Usaha Pertanian yang terbit</b>	<b>Laporan</b>
					Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen
					Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
					Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan
					<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Terlaksananya Penyuluhan pertanian</b>	<b>Jumlah Laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian</b>	<b>Laporan</b>
					<b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan penyuluh pertanian</b>	<b>Jumlah laporan pengembangan ketenagaan penyuluh yang dilaksanakan</b>	<b>Laporan</b>
					Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Unit
					Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Terlaksananya Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang
					<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Terlaksananya penerapan penyuluh pertanian</b>	<b>Jumlah penerapan penyuluh pertanian yang dilaksanakan</b>	<b>Laporan</b>
					Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Terlaksananya Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
					Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok
					<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>	<b>Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan</b>	<b>Jumlah Laporan Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan yang dikembangkan</b>	<b>Laporan</b>





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

						Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Tertindakannya Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Laporan	
						Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Tertindakannya Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	
4.	<b>MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>	Indeks Reformasi Birokras	Predikat (Nilai)	.1. Mewujudkan akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP	Predikat (Nilai)	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>TERLAKSANANYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PERSEN</b>
4.	1. Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat (Nilai)	.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP PD	Predikat (Nilai)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Dokumen
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
							Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan
							Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen
							<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
							Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
							Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Orang
							<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen
					Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia</b>	<b>Unit</b>
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
					Pengadaan Alat Besar	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit
					Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit
					Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>Laporan</b>
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	<b>Unit</b>
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
						Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Ha



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran RENSTRA yang telah ditetapkan dilanjutkan dengan perumusan strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 - 2026, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 5.1 (T-C.26) Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Perkebunan dan Hortikultura

<b>Tujuan 3:</b>	<b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan</b>		
<b>Sasaran 3.1.</b>	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Nilai Tambah Produksi dan Produktivitas sub sektor Perkebunan dan Hortikultura	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan dan hortikultura unggulan daerah	Meningkatkan pertumbuhan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan Budidaya Tanaman Perkebunan dan Hortikultura sesuai GAP</li> <li>- Bantuan sarana dan prasarana Pertanian</li> <li>- Inovasi dan Adopsi teknologi</li> <li>- Pengembangan tanaman (perluasan, intensifikasi)</li> <li>- Inovasi dan Adopsi teknologi</li> <li>- Pengendalian Gangguan Komoditas Perkebunan dan Hortikultura</li> <li>- Melakukan pembinaan dan penguatan kelompok tani</li> <li>- Pengembangan Inovasi dan Adopsi teknologi pengolahan</li> <li>- Pengawasan peredaran benih perkebunan dan hortikultura bersertifikat</li> <li>- Menyediakan benih unggul tanaman perkebunan dan hortikultura</li> </ul>

Berdasarkan tabel diatas, strategi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencapai sasaran yaitu dengan cara meningkatkan pertumbuhan produksi dan produktivitas serta nilai tambah tanaman perkebunan yang dituangkan dalam arah kebijakan Dinas dimulai dari penanganan dari hulu hingga hilir, penyediaan benih unggul, penerapan GAP hingga adopsi teknologi pengolahan hasil dan pemasaran. Strategi dan arah kebijakan dari Dinas ditentukan berdasarkan analisis SWOT yang telah dijabarkan pada Bab III dengan pertimbangan

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas dengan mempertimbangkan peluang yang terjadi pada saat ini dan kemungkinan ancaman dalam jangka waktu tiga tahun kedepan.

Permasalahan yang umum terjadi dewasa ini masih cukup kompleks terjadi mulai dari pengolahan lahan, pemilihan bibit, teknik budi daya, sistem tanam, pengendalian hama penyakit, manajemen panen dan pascapanen hingga kegiatan hilir berupa pemasaran. Semuanya butuh strategi yang bijaksana. Selama ini banyak petani yang bertani dengan dasar pengetahuan turunan. Mereka melakukan kegiatan pertanian/perkebunan/hortikultura mengikui pola yang telah dilakukan leluhurnya. Tanpa disadari, potensi lahan dan kegiatan perkebunan dibiarkan begitu saja. Padahal cara bertani yang bijaksana bisa menjadi bantuan yang besar terhadap kehidupan petani. Good Agricultural Practices (GAP) adalah cara pelaksanaan budi daya tanaman perkebunan/hortikultura secara baik, benar dan tepat.

GAP mencakup kegiatan pratanam hingga penanganan pascapanen dalam upaya menghasilkan produk yang aman dikonsumsi, bermutu baik, ramah lingkungan, berkelanjutan dan berdaya saing. GAP adalah salah satu sistem sertifikasi dalam praktik budi daya tanaman yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan dan menerapkan prinsip telusur balik (traceability), yaitu produk dapat ditelusuri asal-usulnya, dari konsumen sampai lahan usaha. Tingginya nilai produksi pada tanaman perkebunan dan hortikultura tergantung dari benih tanam yang digunakan. Benih merupakan sarana produksi utama dalam budidaya karena dengan benih bermutu dapat meningkatkan produksi, benih bermutu secara ekonomi memberi nilai tambah/manfaat bagi masyarakat/petani. Benih bermutu (Undang-undang No. 12 tahun 1992) mempunyai ciri sebagai berikut:

- a) Produktivitasnya tinggi (Produksi/satuan luas), yaitu varietas/klon mempunyai produksi yang tinggi, artinya gap antara produksi yang diperoleh pada lingkungan pengujian sebelum varietas/klon tersebut dirilis dengan lingkungan pertanaman luas atau di masyarakat rendah,



- b) Pertumbuhan seragam, yaitu pertumbuhan antar satu tanaman dalam suatu pertanaman sama, baik dari aspek tinggi tanaman, diameter batang, perkembangan kanopi, dan produktivitas.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi rendahnya produksi dan kualitas tanaman adalah OPT yaitu Organisme Pengganggu Tumbuhan. Akibat serangan OPT, diperkirakan produksi menurun sekitar 30 % - 40 %. Hal tersebut menyebabkan menurunnya pendapatan petani yang berpotensi mengakibatkan kerugian petani yang besar. Selain menurunkan produksi, OPT juga menurunkan kualitas produksi sehingga mempengaruhi harga produk menjadi rendah. Banyak kasus menunjukkan bahwa karena kualitas produk masih rendah dan adanya sisa-sisa serangan OPT, sehingga produk perkebunan/hortikultura kesulitan memasuki pasar ekspor. Untuk menghindarkan kerugian akibat serangan OPT, sampai saat ini masih banyak petani dan masyarakat yang mengartikan pengendalian OPT sama dengan penggunaan pestisida kimia. Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dapat menimbulkan resistensi, resurgensi dan ledakan hama sekunder, pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman pada Pasal 20 Mengamanatkan bahwa Perlindungan Tanaman dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Dalam PHT, penggunaan pestisida masih diperbolehkan, tetapi aplikasinya menjadi alternatif terakhir bila cara-cara pengendalian lainnya tidak mampu mengatasi serangan OPT. Salah satu cara alternatif adalah dengan penggunaan APH (Agensi Pengendali Hayati). Namun pemanfaatan APH secara konvensional belum mampu mengatasi beberapa jenis OPT, seperti penggerek batang, penggerek cabang atau ranting, penggerek buah, penyakit layu pembuluh dan penyakit mati pucuk. Sehingga perlu inovasi baru dalam pemanfaatan APH, misalnya dengan mengambil Metabolit Sekunder (MS)- nya. MS APH dapat digunakan sebagai menurunkan intensitas dan pengendali serangan OPT karena Metabolit





Sekunder merupakan senyawa organik yang dibentuk saat mendekati tahap stasioner. Sisa metabolisme ini mengandung zat antibiotika, enzim, hormon, dan toksin.

Dalam peningkatan pertumbuhan produksi dan produktivitas selain penggunaan benih unggul dan perlakuan GAP, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki kebijakan pengembangan areal pada lahan – lahan potensi perkebunan/hortikultura dan lahan kering yang belum termanfaatkan. Dengan logika semakin tinggi luas areal tanam berbanding lurus dengan areal terpanen yang mampu meningkatkan pertumbuhan produksi disuatu wilayah.

Kelompok tani perkebunan dan hortikultura umumnya terkendala oleh modal. Dinas Perkebunan dan Hortikultura masih membuka peluang untuk bantuan fisik berupa benih, pupuk dan peralatan pada kelompok-kelompok tani yang tentunya dengan pemberiannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kebijakan tersebut bersifat stimulan yang kedepan petani diarahkan untuk menjadi kelompok yang mandiri melalui Program pemberdayaan berupa penguatan dan peningkatan kelas kelompok. Petani dibentuk dan diarahkan tidak hanya berkecimpung pada kegiatan hulu, namun mampu menyentuh dan mengelola produk yang dihasilkan sehingga nilai tambah produk perkebunan dapat dirasakan oleh petani itu sendiri.

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Penyusunan rencana program dan kegiatan RENSTRA 2024 – 2026 berdasarkan PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah stakeholders dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Program dan kegiatan pembangunan perkebunan dan hortikultura tahun 2024 -2026 direncanakan meliputi:

### **6.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program pada Pemerintah Daerah disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 8 kegiatan dan 57 sub kegiatan. Indikator program dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Nilai AKIP PD
- b) Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

Evaluasi terhadap keberhasilan program diukur dari 2 parameter diatas. Parameter tersebut didapatkan dari sub kegiatan dan kegiatan yang dapat disimpulkan akan mempengaruhi indikator tersebut.

### **6.2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian merupakan program yang sangat kompleks. Program tersebut terdiri dari 2 kegiatan yaitu Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman.

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian memiliki indikator keberhasilan program yaitu : Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Program ini merupakan manifestasi dari langkah strategis yang harus ditempuh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura baik tanaman semusim maupun tahunan melalui beberapa pendekatan, yakni Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Rehabilitasi. Beberapa pendekatan peningkatan produksi dan produktivitas tersebut dititik beratkan kepada ketersediaan lahan yang sesuai dengan standar baku teknis, ketersediaan benih unggul dan

bersertifikat, ketersediaan pasokan pupuk, prasarana dan sarana budidaya, serta teknik budidaya yang sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP), dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan SDM petani kaitannya dengan pengetahuan dan skill tentang budidaya tanaman perkebunan.

Pada tahap selanjutnya, agar program tidak berhenti saat panen, petani dilakukan pembinaan untuk melakukan aktivitas pasca panen dan pengolahan hasil. Hal ini dilakukan untuk peningkatan nilai tambah produk perkebunan dan hortikultura yang difasilitasi pengolahan hasil. Petani pekebun yang awalnya hanya bergerak pada sektor hulu mulai diarahkan pada kegiatan hilirisasi. Sehingga diharapkan petani mendapatkan nilai tambah dari hasil komoditi yang ditangani, dan bersiap untuk bersaing pada pasar produk domestik maupun global.

### **6.3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dimaksudkan untuk mendukung dan menyiapkan infrastruktur kebutuhan akan budidaya yang dilakukan oleh petani pekebun. Program ini diarahkan pada peningkatan SDM kelompok tani sehingga indikator program dirumuskan yaitu Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dapat dicapai melalui Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian yang terdiri dari 11 sub kegiatan.

### **6.4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian merupakan rangkaian penting dalam upaya menjaga produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura selain melalui pendekatan budidaya tanaman. Penanganan hama yang kurang tepat, dapat menurunkan angka produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura secara signifikan, oleh karena itu dibutuhkan langkah yang tepat dan akurat dalam menanggulangi gangguan dan serangan hama secara lebih terukur dan terstruktur. Selain gangguan dan serangan hama tanaman perkebunan, potensi masalah lainnya ialah lahan tanaman perkebunan yang rawan terdampak bencana alam, seperti tanah longsor, eskavasi tanah, banjir, dan

lain-lain yang butuh penanganan dalam bentuk konservasi lahan. Konservasi tanaman juga dibutuhkan dalam rangka menjaga kelestarian benih induk yang memiliki spesifik lokasi, yang tentunya tidak mudah untuk dikembangkan di lokasi lain.

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian adalah jawaban untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Program ini memiliki indikator yaitu Jumlah Laporan Pengendalian Bencana Perkebunan dan Hortikultura dan dtuangkan kedalam kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi yang didukung oleh 4 sub kegiatan, yaitu:

1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
4. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

#### **6.5. Program Perizinan Usaha Pertanian**

Program Perizinan Usaha Pertanian merupakan kebijakan untuk memfasilitasi Peraturan Menteri Pertanian No. 5/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission. Keberadaan Dinas disini adalah sebagai fasilitator, pembina dan melakukan rekomendasi terhadap syarat administrasi dan teknis kelayakan usaha perkebunan. Izin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud mencakup:

- a) usaha budi daya tanaman perkebunan;
- b) usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- c) usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan; dan
- d) usaha produksi benih tanaman.

Program ini memiliki indikator persentase rekomendasi teknis yang diberikan yang didukung melalui kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

#### **6.6. Program Penyuluhan Pertanian**

Program Penyuluhan Pertanian dimaksudkan untuk mendukung peningkatan SDM kelompok tani sehingga indikator program dirumuskan yaitu Terlaksananya Penyuluhan Pertanian dapat dicapai melalui 3 kegiatan yaitu Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan terdiri dari 6 sub kegiatan

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah - langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam Program/Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Hortikultura guna meningkatkan nilai tambah produksi perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :









RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

			3	27	1	1,0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	25	50.000.000	25	55.000.000	25	60.000.000	75	165.000.000		Kenda ri
			3	27	1	1,0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.000.000	15	165.000.000		Kenda ri
			3	27	1	1,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	80	137	1.239.000.000	137	1.362.900.000	137	1.498.340.000	411	4.100.240.250		
			3	27	01	1,0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	60.000.000	12	66.000.000	12	72.000.000	36	198.000.000		Kenda ri
			3	27	01	1,0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.000.000	12	66.000.008		
			3	27	1	1,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	120.000.000	12	132.000.000	12	145.200.000	36	397.200.024		Kenda ri
			3	27	1	1,0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	120.000.000	12	132.000.000	12	145.200.000	36	397.200.024		Kenda ri
			3	27	01	1,0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokume n	12	12	18.000.000	12	19.800.000	12	21.780.000	36	59.580.024		Kenda ri
			3	27	1	1,0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	24	96.000.000	24	105.600.000	24	116.160.000	72	317.760.048		Kenda ri
			3	27	01	1,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	60	800.000.000	60	880.000.000	60	968.000.000	180	2.648.000.120		17 Kab./ Kota





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

			3	27	01	1.0	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	4	200.000.000	4	220.000.000	4	242.000.000	12	662.000.000		Kenda ri
			3	27	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	36	37	1.100.000.000	37	1.210.000.000	37	1.331.000.000	111	3.641.000.000		
			3	27	1	1.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	40.000.000	12	44.000.000	12	48.400.000	36	132.400.000		Kenda ri
			3	27	01	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	720.000.000	12	792.000.000	12	871.200.000	36	2.383.200.000		Kenda ri
			3	27	01	1.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	3	331.000.000		
			3	27	1	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	240.000.000	12	264.000.000	12	290.400.000	36	794.400.000		Kenda ri
			3	27	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	112	126	1.448.000.000	126	1.592.800.000	126	1.752.080.000	378	4.792.880.000		
			3	27	01	1.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	11	11	275.000.000	11	302.500.000	11	332.750.000	33	910.250.000		Kenda ri



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

				3	27	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	5	125.000.000	5	137.500.000	5	151.250.000	15	413.750.000		
				3	27	1	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	96	100	48.000.000	100	52.800.000	100	58.080.000	300	158.880.000		Kenda ri
				3	27	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	500.000.000	5	550.000.000	5	605.000.000	15	1.655.000.000		Kenda ri
				3	27	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	5	500.000.000	5	550.000.000	5	605.000.000	15	1.655.000.000		Kenda ri
<b>Tujuan 1: Meningkatkan Nilai Tambah Produksi dan Produktivitas sub sektor Perkebunan dan Hortikultura</b>		<b>Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan</b>	<b>Persen</b>	<b>3</b>	<b>27</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>					<b>23.766.000.000</b>		<b>26.112.100.000</b>		<b>28.693.310.000</b>		<b>80.143.660.000</b>		
<b>Sasaran 1.: Meningkatkan produksi tanaman perkebunan dan hortikultura unggulan daerah</b>		<b>Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan</b>	<b>Ton</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Jumlah Laporan Sarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan</b>	<b>Laporan</b>	<b>65</b>	<b>18</b>	<b>14.800.000.000</b>	<b>20</b>	<b>16.280.000.000</b>	<b>22</b>	<b>17.908.000.000</b>	<b>60</b>	<b>48.988.000.000</b>		
		<b>Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura</b>	<b>Ton</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	<b>1,01</b>		<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	<b>Jumlah pengawasan peredaran sarana pertanian yang dilaksanakan</b>	<b>Laporan</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>11</b>	<b>1.760.000.000</b>	<b>13</b>	<b>1.936.000.000</b>	<b>33</b>	<b>5.296.000.000</b>		<b>PSP</b>



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

				3	27	02	1,0 1	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Tenakšana pengawasan peredaran Pupuk, Pesticida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	0	1	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000		331.000.000		17 Kab./ Kota
				3	27	02	1,0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	11	2	300.000.000	2	330.000.000	3	363.000.000	5	993.000.000		17 Kab./ Kota
				3	27	02	1,0 1	03	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Laporan		2	400.000.000	2	440.000.000	2	484.000.000	6	1.324.000.000		
				3	27	02	1,0 1	05	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Laporan		2	400.000.000	2	440.000.000	2	484.000.000	6	1.324.000.000		
				3	27	02	1,0 1	06	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Laporan		1	200.000.000	1	220.000.000	2	242.000.000	4	662.000.000		
				3	27	02	1,0 1	07	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Laporan		1	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	5	662.000.000		
				3	27	02	1,0 2		<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	<b>Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan dan Hortikultura</b>	Laporan	54	9	13.200.000.000	9	14.520.000.000	9	15.972.000.000	27	43.692.000.000		
				3	27	02	1,0 2	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	10	12	1.200.000.000	13	1.320.000.000	14	1.452.000.000	39	3.972.000.000	BPSBPH	17 Kab./ Kota



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

				3	27	02	1,0 2	05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan		1	8.400.000.000	1	9.240.000.000	1	10.164.000.000	3	27.804.000.000		
				3	27	02	1,0 2	06	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan		10,0 00	100.000.000	10,0 0	110.000.000	10,0 0	121.000.000	30,0 00	331.000.000		
				3	27	02	1,0 2	07	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang		200. 000	2.000.000.000	200,0 00	2.200.000.000	200,0 00	2.420.000.000	600. 000	6.620.000.000		
				3	27	02	1,0 2	08	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata		1,00 0	10.000.000	1.000	11.000.000	1.000	12.100.000	3,00 0	33.100.000		
				3	27	02	1,0 2	10	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek		1,00 0	10.000.000	1.000	11.000.000	1.000	12.100.000	3,00 0	33.100.000		
				3	27	02	1,0 2	11	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Gram		1,00 0	100.000.000	1.000	110.000.000	1.000	121.000.000	3,00 0	331.000.000		
				3	27	02	1,0 2	12	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang		118. 000	1.180.000.000	118,0 00	1.298.000.000	118,0 00	1.427.800.000	354. 000	3.905.800.000		
				3	27	02	1,0 2	14	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton		2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	6	662.000.000		



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

				3	27	03			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Jumlah Laporan Prasarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan	Laporan	32	11	6.000.000.000	11	6.600.000.000	11	7.260.000.000	33	19.860.000.000		
				3	27	03	1,01		<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah laporan penataan prasarana yang dilaksanakan	Laporan	32	11	6.000.000.000	11	6.600.000.000	11	7.260.000.000	33	13.571.000.000		
				3	27	03	1,01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	0	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	3	662.000.000	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	17 Kab./ Kota
				3	27	03	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	32	15	3.000.000.000	20	3.300.000.000	25	3.630.000.000	60	9.930.000.000	PSP	17 Kab./ Kota
				3	27	03	1,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	0	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	3	662.000.000	PSP	17 Kab./ Kota
				3	27	03	1,01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	0	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	3	662.000.000	UPTD	17 Kab./ Kota
				3	27	03	1,01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	3	331.000.000	PSP	17 Kab./ Kota
				3	27	03	1,01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	0	4	400.000.000	4	440.000.000	4	484.000.000	12	1.324.000.000	UPTD	17 Kab./ Kota
				3	27	03	1,01	11	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit		2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	6	662.000.000		







RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

			3	27	05	1,0 1	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	0	5	500.000.000	5	550.000.000	5	605.000.000	15	1.655.000.000	BPTPH	17 Kab./ Kota
			3	27	05	1,0 1	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	3	331.000.000	BPTPH	17 Kab./ Kota
			3	27	06			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Jumlah Laporan penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura	Laporan	0	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000		
			3	27	06	1,0 1		<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang terbit	Laporan	0	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000		
			3	27	06	1,0 1	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		17 Kab./ Kota
			3	27	06	1,0 1	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		17 Kab./ Kota
			3	27	06	1,0 1	05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		17 Kab./ Kota
			3	27	07			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Jumlah Laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian	Laporan	0	6	566.000.000	6	622.100.000	6	684.310.000	14	3.444.660.000	PSDM	
			3	27	07	1,0 1		<b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah laporan pengembangan ketenagaan penyuluh yang dilaksanakan	Laporan	0	2	116.000.000	2	127.100.000	2	139.810.000	2	382.910.000	PSDM	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024 - 2026

				3	27	07	1,0 1	01	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Unit	0	10	66.000.000	10	72.100.000	10	79.310.000	30	217.410.000	Kenda ri
				3	27	07	1,0 1	02	Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	50	50.000.000	50	55.000.000	50	60.500.000	150	165.500.000	Kenda ri
				3	27	07	1,0 2		<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Jumlah laporan penerapan penyuluh pertanian yang dilaksanakan</b>	<b>Laporan</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>100.000.000</b>	<b>2</b>	<b>110.000.000</b>	<b>2</b>	<b>121.000.000</b>	<b>6</b>	<b>1.903.250.000</b>	<b>PSDM</b>
				3	27	07	1,0 2	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokume n	0	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.500.000	6	165.500.000	17 Kab./ Kota
				3	27	07	1,0 2	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompo k	0	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.500.000	6	165.500.000	17 Kab./ Kota
				3	27	07	1,0 3		<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>	<b>Jumlah Laporan Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan yang dikembangkan</b>	<b>Laporan</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>350.000.000</b>	<b>2</b>	<b>385.000.000</b>	<b>2</b>	<b>423.500.000</b>	<b>6</b>	<b>1.158.500.000</b>	<b>PSDM</b>
				3	27	07	1,0 3	05	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Laporan	0	9	225.000.000	20	247.500.000	20	272.250.000	49	744.750.000	17 Kab./ Kota
				3	27	07	1,0 3	06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	0	5	125.000.000	10	137.500.000	10	151.250.000	25	413.750.000	17 Kab./ Kota



## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan Dinas Perkebunan dan Hortikultura. Indikator kinerja sasaran yang menjadi target Dinas Perkebunan dan Hortikultura tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1 (T-C.28) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun		
		2024	2025	2026
<b>I</b>	<b>Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%) (Indikator RPD)</b>	<b>2,75</b>	<b>2,89</b>	<b>2,97</b>
<b>1.</b>	<b>Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)</b>	<b>208.229</b>	<b>208.553</b>	<b>208.884</b>
	Kakao	104.754	104.806	104.859
	Jambu Mete	36.321	36.339	36.358
	Kelapa Dalam	39.335	39.374	39.414
	Cengkeh	9.410	9.457	9.504
	L a d a	5.531	5.559	5.586
	Kopi robusta	2.705	2.718	2.732
	P a l a	633	664	698
	Kelapa Sawit	6.721	6.789	6.857
	Sagu	2.819	2.847	2.876
<b>2.</b>	<b>Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)</b>	<b>52.009</b>	<b>52.247</b>	<b>52.484</b>
	Bawang Merah	458	463	468
	Cabai Rawit	3.923	3.927	3.931
	Cabai Besar	2.545	2.548	2.550
	Jeruk	21.100	21.206	21.312
	Durian	23.983	24.103	24.223

## BAB VIII PENUTUP

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Masa Jabatan Kelapa Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang kemudian ditetapkan Peraturan Gubernur nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026, selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026.

Program dan kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan kawasan dan fokus komoditas berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Dokumen ini akan menjadi acuan dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang berorientasi produksi dan produktivitas pertanian, terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

Demikian Dokumen Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 disusun, dengan harapan dapat mendukung dan mensinergiskan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pembangunan Pertanian khususnya pada sub sektor Perkebunan dan Hortikultura dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kendari, Juli 2023  
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura  
Provinsi Sulawesi



**LA HARUNA, S.P., M.Si.**  
NIP. 19721231 200212 1 026





TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)
				3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	6	33.100.000		Kendari
				3	27	1	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	3	331.000.000		17 Kab./Kota
				3	27	1	1		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>19.069.230.700</b>	<b>21</b>	<b>20.976.153.770</b>	<b>21</b>	<b>22.886.676.840</b>	<b>63</b>	<b>62.932.061.310</b>		
				3	27	1	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	210	208	18.709.230.700	208	20.580.153.770	208	22.451.076.840	624	61.740.461.310		Kendari
				3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	3	16.550.000		Kendari
				3	27	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	3	16.550.000		
				3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	350.000.000	18	385.000.000	18	423.500.000	54	1.158.500.000		Kendari
				3	27	1	1,1		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>413.750.000</b>	<b>269</b>	<b>455.125.000</b>	<b>274</b>	<b>496.500.000</b>	<b>807</b>	<b>1.365.375.000</b>		
				3	27	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	3	165.000.000		
				3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	225	168.750.000	225	185.625.000	225	202.500.000	675	556.875.000		Kendari

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					Target	Rp.
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)	
				3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	3	16.500.000			
				3	27	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	3	16.500.000			
				3	27	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	3	33.000.000			
				3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	5	75.000.000	10	82.500.000	15	90.000.000	30	247.500.000		Kendari	
				3	27	1	1.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	25	50.000.000	25	55.000.000	25	60.000.000	75	165.000.000		Kendari	
				3	27	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.000.000	15	165.000.000		Kendari	
				3	27	1	1.1		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>80</b>	<b>137</b>	<b>1.239.000.000</b>	<b>137</b>	<b>1.362.900.000</b>	<b>137</b>	<b>1.498.340.000</b>	<b>411</b>	<b>4.100.240.250</b>			
				3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	60.000.000	12	66.000.000	12	72.000.000	36	198.000.000		Kendari	
				3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.000.000	12	66.000.008			
				3	27	1	1.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	120.000.000	12	132.000.000	12	145.200.000	36	397.200.024		Kendari	
				3	27	1	1.1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	120.000.000	12	132.000.000	12	145.200.000	36	397.200.024		Kendari	
				3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	18.000.000	12	19.800.000	12	21.780.000	36	59.580.024		Kendari	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)
				3	27	1	1,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	24	96.000.000	24	105.600.000	24	116.160.000	72	317.760.048		Kendari
				3	27	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	60	800.000.000	60	880.000.000	60	968.000.000	180	2.648.000.120		17 Kab./Kota
				3	27	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	3	16.500.002		
				3	27	01	1,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	<b>Unit</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>39</b>	<b>5.390.000.000</b>	<b>40</b>	<b>5.929.000.000</b>	<b>113</b>	<b>16.219.000.000</b>		
				3	27	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	2	1.500.000.000	2	1.650.000.000	2	1.815.000.000	6	4.965.000.000		Kendari
				3	27	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	10	400.000.000	10	440.000.000	10	484.000.000	30	1.324.000.000		Kendari
				3	27	1	1,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	3	662.000.000		Kendari
				3	27	1	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	10	200.000.000	15	220.000.000	16	242.000.000	41	662.000.000		Kendari
				3	27	1	1,1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Unit	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	3	331.000.000		Kendari
				3	27	1	1,1	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	3	331.000.000		Kendari
				3	27	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	2.000.000.000	1	2.200.000.000	1	2.420.000.000	3	6.620.000.000		Kendari
				3	27	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	4	200.000.000	4	220.000.000	4	242.000.000	12	662.000.000		Kendari

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)
				3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Sanganun Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	4	200.000.000	4	220.000.000	4	242.000.000	12	662.000.000		Kendari
				3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	36	37	1.100.000.000	37	1.210.000.000	37	1.331.000.000	111	3.641.000.000		
				3	27	1	1.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	40.000.000	12	44.000.000	12	48.400.000	36	132.400.000		Kendari
				3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	720.000.000	12	792.000.000	12	871.200.000	36	2.383.200.000		Kendari
				3	27	01	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	3	331.000.000		
				3	27	1	1.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	12	12	240.000.000	12	264.000.000	12	290.400.000	36	794.400.000		Kendari
				3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	112	126	1.448.000.000	126	1.592.800.000	126	1.752.080.000	378	4.792.880.000		
				3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	11	11	275.000.000	11	302.500.000	11	332.750.000	33	910.250.000		Kendari
				3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	5	125.000.000	5	137.500.000	5	151.250.000	15	413.750.000		
				3	27	1	1.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	96	100	48.000.000	100	52.800.000	100	58.080.000	300	158.880.000		Kendari

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					Target	Rp.
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)	
				3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	500.000.000	5	550.000.000	5	605.000.000	15	1.655.000.000		Kendari	
				3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	5	500.000.000	5	550.000.000	5	605.000.000	15	1.655.000.000		Kendari	
<b>Tujuan 1: Meningkatkan Nilai Tambah Produksi dan Produktivitas sub sektor Perkebunan dan Hortikultura</b>		<b>Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan</b>	<b>Persen</b>	3	27				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				23.766.000.000		#####		#####		80.143.660.000				
	<b>Sasaran 1.: Meningkatkan produksi tanaman perkebunan dan hortikultura unggulan daerah</b>	<b>Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan</b>	<b>Ton</b>	3	27	02			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Jumlah Laporan Sarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan</b>	<b>Laporan</b>	65	18	14.800.000.000	20	#####	22	#####	60	48.988.000.000			
		<b>Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura</b>	<b>Ton</b>	3	27	02	1,01		<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	<b>Jumlah pengawasan peredaran sarana pertanian yang dilaksanakan</b>	<b>Laporan</b>	11	9	1.600.000.000	11	1.760.000.000	13	1.936.000.000	33	5.296.000.000		PSP	
													9	1.600.000.000	11	1.760.000.000	13	1.936.000.000	33	5.296.000.000			
													-	-	-	-	-	-	-	-			
				3	27	02	1,01	01	<b>Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian</b>	<b>Terlaksana pengawasan peredaran Pupuk, Pesticida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian</b>	<b>Laporan</b>	0	1	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	5	331.000.000		17 Kab. Kota	
				3	27	02	1,01	02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	<b>Dokumen</b>	11	2	300.000.000	2	330.000.000	3	363.000.000	7	993.000.000		17 Kab. Kota	
				3	27	02	1,01	03	<b>Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan</b>	<b>Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan</b>	<b>Laporan</b>		2	400.000.000	2	440.000.000	2	484.000.000	6	1.324.000.000			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)
				3	27	02	1,01	05	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Laporan		2	400.000.000	2	440.000.000	2	484.000.000	6	1.324.000.000		
				3	27	02	1,01	06	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Laporan		1	200.000.000	1	220.000.000	2	242.000.000	4	662.000.000		
				3	27	02	1,01	07	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Laporan		1	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	5	662.000.000		
				3	27	02	1,02		<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	<b>Jumlah pengawasan mutunya, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan dan Hortikultura</b>	<b>Laporan</b>	<b>54</b>	<b>9</b>	<b>13.200.000.000</b>	<b>9</b>	<b>14.520.000.000</b>	<b>9</b>	<b>15.972.000.000</b>	<b>27</b>	<b>43.692.000.000</b>		
				3	27	02	1,02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	10	12	1.200.000.000	13	1.320.000.000	14	1.452.000.000	39	3.972.000.000	BPSBPH	17 Kab. Kota
				3	27	02	1,02	05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat,	Laporan		1	8.400.000.000	1	9.240.000.000	1	10.164.000.000	3	27.804.000.000		bersertifikat
				3	27	02	1,02	06	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan		10.000	100.000.000	10.000	110.000.000	10.000	121.000.000	30.000	331.000.000		
				3	27	02	1,02	07	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang		200.000	2.000.000.000	200.000	2.200.000.000	200.000	2.420.000.000	#####	6.620.000.000		
				3	27	02	1,02	08	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata		1.000	10.000.000	1.000	11.000.000	1.000	12.100.000	3.000	33.100.000		
				3	27	02	1,02	10	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek		1.000	10.000.000	1.000	11.000.000	1.000	12.100.000	3.000	33.100.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)
				3	27	02	1,02	11	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Gram		1.000	100.000.000	1.000	110.000.000	1.000	121.000.000	3.000	331.000.000		
				3	27	02	1,02	12	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang		118.000	1.180.000.000	118.000	1.298.000.000	118.000	1.427.800.000	#####	3.905.800.000		
				3	27	02	1,02	14	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton		2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	6	662.000.000		
				3	27	03			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Jumlah Laporan Prasarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan</b>	Laporan	32	11	6.000.000.000	11	6.600.000.000	11	7.260.000.000	33	19.860.000.000		
				3	27	03	1,01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan penataan prasarana yang dilaksanakan	Laporan	32	11	6.000.000.000	11	6.600.000.000	11	7.260.000.000	33	13.571.000.000		
				3	27	03	1,01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	0	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	3	662.000.000	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	17 Kab./Kota
				3	27	03	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	32	15	3.000.000.000	20	3.300.000.000	25	3.630.000.000	60	9.930.000.000	PSP	17 Kab./Kota
				3	27	03	1,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	0	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	3	662.000.000	PSP	17 Kab./Kota
				3	27	03	1,01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	0	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	3	662.000.000	UPTD	17 Kab./Kota
				3	27	03	1,01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	3	331.000.000	PSP	17 Kab./Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)
				3	27	03	1,01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutih Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	0	4	400.000.000	4	440.000.000	4	484.000.000	12	1.324.000.000	UPTD	17 Kab./Kota
				3	27	03	1,01	11	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit	2	2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	6	662.000.000		
				3	27	03	1,01	13	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	ha	100	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	300	3.310.000.000		
				3	27	03	1,01	14	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit	2	2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	6	662.000.000		
				3	27	03	1,01	17	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit	3	3	300.000.000	4	330.000.000	4	363.000.000	11	993.000.000		
				3	27	03	1,01	20	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit	2	2	200.000.000	3	220.000.000	3	242.000.000	8	662.000.000		
				3	27	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian penanggulangan Bencana Perkebunan dan Hortikultura yang dilaksanakan</b>	Laporan	1	4	2.100.000.000	4	2.310.000.000	4	2.541.000.000	12	6.951.000.000		
				3	27	05	1,01		<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian Bencana Perkebunan dan Hortikultura</b>	Laporan	1	4	2.100.000.000	4	2.310.000.000	4	2.541.000.000	12	6.951.000.000		
				3	27	05	1,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	1	10	1.000.000.000	10	1.100.000.000	10	1.210.000.000	30	3.310.000.000	BPTPH	17 Kab./Kota
				3	27	05	1,01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	0	5	500.000.000	5	550.000.000	5	605.000.000	15	1.655.000.000	BPTPH	17 Kab./Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					Target	Rp.
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)	
				3	27	05	1,01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	0	5	500.000.000	5	550.000.000	5	605.000.000	15	1.655.000.000	BPTPH	17 Kab./Kota	
				3	27	05	1,01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	3	331.000.000	BPTPH	17 Kab./Kota	
				3	27	06			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Jumlah Laporan penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura	Laporan	0	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000			
				3	27	06	1,01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang terbit	Laporan	0	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000			
				3	27	06	1,01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		17 Kab./Kota	
				3	27	06	1,01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		17 Kab./Kota	
				3	27	06	1,01	05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		17 Kab./Kota	
				3	27	07			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Jumlah Laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian	Laporan	0	6	566.000.000	6	622.100.000	6	684.310.000	14	3.444.660.000	PSDM		
				3	27	07	1,01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan pengembangan ketenagaan penyuluh yang dilaksanakan	Laporan	0	2	116.000.000	2	127.100.000	2	139.810.000	2	382.910.000	PSDM		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)
				3	27	07	1,01	01	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Unit	0	10	66.000.000	10	72.100.000	10	79.310.000		217.410.000	30	Kendari
				3	27	07	1,01	02	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	50	50.000.000	50	55.000.000	50	60.500.000		165.500.000	150	Kendari
				3	27	07	1,02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan penerapan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	Laporan	0	2	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	6	1.903.250.000		PSDM
				3	27	07	1,02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	0	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.500.000		165.500.000	6	17 Kab./Kota
				3	27	07	1,02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	0	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.500.000		165.500.000	6	17 Kab./Kota
				3	27	07	1,03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Laporan Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan yang dikembangkan	Laporan	0	2	350.000.000	2	385.000.000	2	423.500.000	6	1.158.500.000		PSDM
				3	27	07	1,03	06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Jumlah Koperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	0	5	125.000.000	10	137.500.000	10	151.250.000		413.750.000	25	17 Kab./Kota
				3	27	07	1,03	05	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Laporan	0	9	225.000.000	20	247.500.000	20	272.250.000		744.750.000	49	17 Kab./Kota

Kendari, Juli 2023  
 Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura  
 Provinsi Sulawesi  
  
**LA RUNA, S.P., M.Si.**  
 19721231 200212 1 026



FORM CASCADING KINERJA

OPD : DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen							
.3.01. Mewujudkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Persen	Tujuan : Meningkatkan Nilai Tambah Produksi dan Produktivitas sub sektor Perkebunan dan Hortikultura	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Persen				
			Sasaran : Meningkatnya produksi tanaman perkebunan dan hortikultura unggulan daerah	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Sarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan	Laporan
				Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian	Jumlah pengawasan peredaran sarana pertanian yang dilaksanakan	Laporan
						Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya pengawasan peredaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksana pengawasan peredaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen
						Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Terlaksananya pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Laporan
						Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terlaksananya pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Laporan
						Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Terlaksananya pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Laporan
						Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terlaksananya pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Laporan

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Laporan
						Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terlaksananya Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat
						Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan
						Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tersedia Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan
						Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tersedia Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang
						Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Tersedia Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata
						Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Tersedia Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek
						Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Tersedia Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Gram
						Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedia Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang
						Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Tersedia Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Prasarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan	Laporan
						Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya penataan prasarana Pertanian	Jumlah penataan prasarana yang dilaksanakan	Laporan

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen
						Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Tersedianya Bangunan Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Tersedianya Bangunan Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan prasarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit
						Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	ha
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Terlaksananya Pengendalian penanggulangan Bencana Perkebunan dan Hortikultura	Jumlah Laporan Pengendalian penanggulangan Bencana Perkebunan dan Hortikultura yang dilaksanakan	Laporan
						Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terlaksananya Pengendalian Bencana Perkebunan dan Hortikultura	Jumlah Laporan Pengendalian Bencana Perkebunan dan Hortikultura	Laporan
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha
						Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha
						Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha
						Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terlaksananya Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan
						<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Terlaksana penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura</b>	<b>Jumlah Laporan penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura</b>	<b>Laporan</b>
						<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedia Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Izin Usaha Pertanian yang terbit</b>	<b>Laporan</b>
						Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen
						Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan
						<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Terlaksananya Penyuluhan pertanian</b>	<b>Jumlah Laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian</b>	<b>Laporan</b>
						<b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan penyuluh pertanian</b>	<b>Jumlah laporan pengembangan ketenagaan penyuluh yang dilaksanakan</b>	<b>Laporan</b>
						Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Unit
						Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Terlaksananya Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang
						<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Terlaksananya penerapan penyuluh pertanian</b>	<b>Jumlah penerapan penyuluh pertanian yang dilaksanakan</b>	<b>Laporan</b>
						Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Terlaksananya Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok
						<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>	<b>Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan</b>	<b>Jumlah Laporan Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan yang dikembangkan</b>	<b>Laporan</b>
						Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Terlaksananya Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Laporan
						Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Terlaksananya Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit
<b>.4. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>	<b>Indeks Reformasi Birokras</b>	<b>Predikat (Nilai)</b>	<b>.1. Mewujudkan akuntabilitas &amp; transparansi penyelenggaraan</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>Predikat (Nilai)</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>TERLAKSANANYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>PERSEN</b>

TUJUAN DAN SASARAN RPD		INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
4.	1. Meningkatnya akuntabilitas & transparansi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat (Nilai)	1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP PD	Predikat (Nilai)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Dokumen
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan
						Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen
						<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang

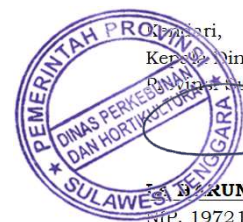
TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Orang
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Orang
						<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan</b>
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
						Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia</b>	<b>Unit</b>



TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
						Pengadaan Alat Besar	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit
						Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit
						Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>Laporan</b>
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	<b>Unit</b>
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
						Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit

TUJUAN DAN SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Ha



Matene, Juli 2023  
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura  
Provinsi Sulawesi Tenggara

**B. ARUNA, S.P., M.Si.**  
NIP. 19721231 200212 1 026

## Lampiran 3.

**DAFTAR LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT (LEM) SEJAHTERA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023**

NO.		NAMA	KECAMATAN	FOKUS KOMODITI	JUMLAH ANGGOTA	KETUA
<b>I</b>	<b>KAB. KONAWE</b>					
	1	ANDOMESINGGO	Besulutu	Kakao	146	Ismail
	2	SILEA	Onembute	Kakao	-	Muh. Syahril
	3	ANDEPOSANDU	Tongauna	Kakao	45	Saharuddin
	4	ONEMBUTE	Besulutu	Kakao	84	Hamsari
	5	ANGGOHU	Tongauna	Kakao	39	Eko Yuwono
	6	WAWORAHA	Lambuya	Kakao	30	Ayuruddin
	7	TETEONA	Wonggeduku	Kakao	-	Saemuddin
	8	EPEEA	Abuki	Kakao	-	Agus Emil
	9	ANGGOTOA	Wawotobi	Kakao	-	Iwan
	10	MATANGGORAI	Padangguni	Kakao	-	Wayan
	11	ATODOPI	Padangguni	Kakao	-	Sahar
<b>TOTAL ANGGOTA</b>					<b>344</b>	
<b>II</b>	<b>KAB. KONAWE SELATAN</b>					
	1	MORAMO	Moramo	Kelapa	336	Jauriah Sarita
	2	ATARI JAYA	Lalembuu	Kakao - Jeruk	66	Mahrus Ali
	3	ASEMBU MULYA	Buke	Kelapa	30	Suiyanto
	4	TETEINEA JAYA	Lalembuu	Kakao	187	Ajis Muin
	5	PUUREMA SUBUR	Lalembuu	Kakao	-	Nawir
	6	AWUNIO	Kolono	Kakao	-	Harmon
	7	TOMBEKUKU	Basala	Kakao	-	H. Herman
	8	IWOI MENDORO	Basala	Kakao	-	M. Jusman
	9	HORODOPI	Benua	Kakao	140	Andi Karnaini
	10	BENUA UTAMA	Benua	Kakao	-	Saharuddin
	11	AWALO	Benua	Kakao	-	Muskamal
	12	WUNDUWATU	Andoolo	Ternak	-	Rebin
	13	KAPUWILA	Andoolo	Kakao	67	Suhartoyo
	14	LAPOA INDAH	Andoolo	Kakao	50	Rusli
	15	MOKUPA	Lalembuu	Kakao	-	H. Selang
	16	AWUNIO	Kolono	Kelapa	-	Harmon
	17	LAMARA	Benua	Kakao	-	Andi Mappajanji
	18	PUUNGGAWUKAWU	Benua	Kakao	-	Sugiman
	19	EPEESI	Benua	Kakao	-	Darmanto
	20	ANESE	Andoolo Barat	Tebu	-	Purnomo
	21	WULELE JAYA	Buke	Kakao	80	
	22	AUNEPE	Wolasi	Pangan	-	
<b>TOTAL ANGGOTA</b>					<b>956</b>	
<b>III</b>	<b>KAB. BOMBANA</b>					
	1	TAMPABULU	Poleang Utara	Tebu	90	Darul Fadli
	2	PUUWONUA	Tontonunu	Kakao	35	Andi Amir
	3	AKACIPONG	Poleang Selatan	Kakao	-	Sabire
	4	LAWATUEA	Poleang Utara	Kakao	-	Aswanto
	5	TONTONUNU	Tontonunu	Kakao	47	Ecce Hafid
	6	POKURUMBA	Poleang	Kakao + Kelapa	30	Suryadi, S.IP.
	7	RAHADOPI	Kabaena	Jambu Mete	-	Anton Ligaya
	8	TIRONGKOTUA	Kabaena	Jambu Mete	-	Solihin
	9	LEBOEA	Poleang Tengah	Kakao	-	Herman R.
<b>TOTAL ANGGOTA</b>					<b>202</b>	
<b>IV</b>	<b>KAB. MUNA</b>					
	1	WAKOBALOAGUNG	Kabangka	Kakao	238	Sri Abdul Prawata
	2	SARIMULYO	Kabangka	Kakao	127	Pasir Abdidin
	3	FONGKANIWA	Tongkuno	Jambu Mete	173	Wa Adu Kapa
	4	LAPADINDI	Tongkuno	Jambu Mete	102	La Ode Tafsir
	5	KONTUMERE	Kabawo	Tebu	50	Alwis SB., S.Kom

NO.	NAMA	KECAMATAN	FOKUS KOMODITI	JUMLAH ANGGOTA	KETUA
6	LANGKORONI	Maligano	Kakao	67	Samir, SH.
7	WANSUGI	Kabangka	Kakao	42	Jumadin, S.Pd
8	WATALIKU	Kabangka	Kakao	-	
<b>TOTAL ANGGOTA</b>				<b>799</b>	
<b>V</b>	<b>KAB. KOLAKA TIMUR</b>				
1	PENANGGOOSI	Lambandia	Kakao	242	Kamarudin
2	IWOI MENGGURA	Lambandia	Kakao	233	Badding
3	BOU	Lambandia	Kakao	158	H. Darman
4	IWOIMEA JAYA	Lambandia	Kakao	189	Arifuddin
5	AERE	Lambandia	Kakao	103	Mustari
6	WONUAMBOTEO	Lambandia	Kakao	210	Marzuki
7	TINETE	Lambandia	Kakao	234	Sudirman
8	LEMBAH SUBUR	Ladongi	Kakao	257	H. Agusnadi
9	ANDOWENGA	Poli-Polia	Kakao	125	Arifudin
10	ULUNDORO	Lambandia	Kakao	128	Muh. Amir, SH
11	ATULANO	Lambandia	Kakao	210	Basri, SP.
12	RUBIA	Lambandia	Kakao	97	Haprianus BL.
13	ANAMBADA	Dangia	Kakao	108	Suardi
14	WANDE	Dangia	Kakao	60	Umar Anca
15	POLENGA JAYA	Poli-Polia	Kakao	102	Saenal
16	WUNDUBITE	Poli-Polia	Kakao	90	Abdul Razak
17	WATUWOHA	Aere	Kakao	53	A. Rahman, S.Hut.
18	PUUNDOKULO	Poli-Polia	Kakao	60	Samiruddin
19	POMBOREA	Lambandia	Kakao	45	
20	LALONGKATIBA	Dangia	Kakao	40	
21	MONDOKE	Aere	Kakao	1	
22	MOKUPA	Aere	kakao	1	
<b>TOTAL ANGGOTA</b>				<b>2746</b>	
<b>VI</b>	<b>KAB. KOLAKA UTARA</b>				
1	PUURAU	Ngapa	Kakao	266	Nuryadi
2	LALOMBUNDI	Ngapa	Kakao	273	Sumardi
3	MATAIWOI	Ngapa	Kakao	178	Samsuddin
4	NYULE	Watunohu	Kakao	110	Zainuddin
5	BATUGANDA	Lasusua	Kakao	333	Pahrim
6	KOROHA	Kodeoha	Kakao	250	M. Lubis Yahya
7	LAMBUNO	Katoi	Kakao	129	Abd. Rasid, ST.
8	TOTALLANG	Lasusua	B. Merah-Kko	319	Asmin
9	NGAPA	Ngapa	Kakao	325	H. Azis Taba
10	POHU	Rante Angin	Kakao	166	Ambo H., S.Md.
11	AWO	Tiwu	Kakao	245	Anwar, S.Sos.
12	LAPOLU	Tiwu	Kakao	290	Ismail S., S.Kom
13	WATUMOTAHA	Ngapa	Kakao	293	Sapri Dona
14	MEETO	Kodeoha	Kakao	246	Dedy Mukhlis
15	LAWOLATU	Ngapa	Kakao	271	Supardi
16	TADAUMERA	Ngapa	Kakao	196	Junaidi, SE
17	KAMISI	Ngapa	Kakao	151	Fadli
18	MIKUASI	Ngapa	Kakao	150	Ahmad
19	KOSALI	Pakue	Kakao	6	Alamsyah, SE
20	KATOI	Katoi	Cengkeh	109	Binsar, S.Pd
21	BABUSSALAM	Lasusua	Cengkeh	-	
22	PADAELO	Ngapa	Kakao	112	
23	KASUMEETO	Pakue	Kakao	100	
24	PUMBOLO	Wawo	Kakao	-	
25	SEUWA	Pakue	Kakao	-	
26	TOAHA	Pakue	Kakao	-	
27	LALUME	Pakue	Kakao	-	
28	KALAHUNDE	Pakue	Kakao	-	
29	KALO	Pakue	Kakao	-	
30	AMOE	Pakue	Kakao	-	

NO.		NAMA	KECAMATAN	FOKUS KOMODITI	JUMLAH ANGGOTA	KETUA
	31	PUNDHO	Pakue	Kakao	-	
	32	TEPOSUA	Pakue	Kakao	-	
<b>TOTAL ANGGOTA</b>					<b>4518</b>	
<b>VII</b>	<b>KAB. BUTON TENGAH</b>					
	1	BALABONE	Mawasangka	KELAPA	-	M. Rasyid A.
<b>TOTAL ANGGOTA</b>					<b>0</b>	
<b>VIII</b>	<b>KAB. BUTON</b>					
	1	KUMBEWAHA	Siontapina	Kakao	50	Idham
	2	SUMBER SARI	Siontapina	Kakao	-	Haeruddin
<b>TOTAL ANGGOTA</b>					<b>50</b>	
<b>IX</b>	<b>KAB. MUNA BARAT</b>					
	1	KEMBAR MAMINASA	Maginti	Kakao	162	Sudirman
	2	BARAKAH	Tiworo Selatan	Kakao	154	Arifin Rahim
	3	KASIMPA JAYA	Tiworo Selatan	Kakao	45	Hendi Susanto
	4	SANGIA TIWORO	Tiworo Selatan	Kakao	127	Amrahdi
	5	KATANGANA	Tiworo Selatan	Kakao	162	Hariyono
	6	MOMUNTU	Tiworo Selatan	Kakao	-	Sobruddin
	7	PARURA JAYA	Tiworo Selatan	Kakao	-	
<b>TOTAL ANGGOTA</b>					<b>650</b>	
<b>X</b>	<b>KAB. BUTON UTARA</b>					
	1	KARYA BAKTI	Kulisusu Barat	Kakao	135	Antonius
	2	KARYA MULYA	Kulisusu Barat	Kakao	97	Hasimuddin
	3	DAMPALA JAYA	Kulisusu Barat	Kakao	-	Bambang
	4	MEKAR JAYA	Kulisusu Barat	Kakao	120	Agustinus
	5	SOLOIAGUNG	Kulisusu Barat	Tebu	25	Sukri
<b>TOTAL ANGGOTA</b>					<b>4</b>	<b>377</b>
<b>XI</b>	<b>KAB. KONAWA UTARA</b>					
	1	PUUPI	Sawa	Kakao	89	Sadaruddin
<b>TOTAL ANGGOTA</b>					<b>89</b>	
<b>XII</b>	<b>KAB. KOLAKA</b>					
	1	SAMAENRE	Wolo	Kakao	137	H. Dahlan
	2	PUNREWARU	Wolo	Kakao	119	Jupri
	3	MALAHA	Samaturu	Kakao	115	Idham, S.Pd.
	4	ULUKALO	Iwoimenda	Kakao	54	Agus M., S.Kom.
	5	RANOMENTAA	Toari	Kakao	134	Eva
	6	LASIROKU	Wolo	Kakao	97	Abdul Azis
	7	ANAWUA	Toari	Tebu	-	Mardin
	8	LAMBOLEMO	Samaturu	Kakao	85	Fais
	9	WOWOLI	Toari	Kakao	-	Sudimin
	10	LANGGOMALI	Wolo	Kakao	90	Sudirman
	11	LAPAO-PAO	Wolo	Kakao	-	Syukur
	12	IWOIMOPURO	Wolo	Kakao	35	Fajar
<b>TOTAL ANGGOTA</b>					<b>866</b>	
<b>XIII</b>	<b>KAB. KONAWA KEPULAUAN</b>					
	1	LEM A		KELAPA	0	
	2	LEM B		KELAPA	0	
<b>TOTAL ANGGOTA</b>					<b>0</b>	



16/04/2023  
 Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura  
 Provinsi Sulawesi Tenggara  
 D. ... S.P., M.Si.  
 NIP. 19721231 200212 1 026